



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2000-2012**

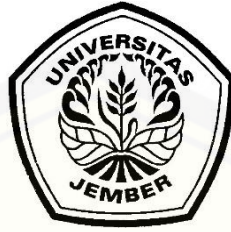
SKRIPSI

Oleh

Andy Kurniawan Firmansyah

NIM 090810101037

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2000-2012**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Andy Kurniawan Firmansyah

NIM 090810101037

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas ridho-Nya yang tak terhingga pada pemilik segala di muka bumi ini Allah SWT, skripsi ini khusus saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Agus Wahyono dan Ibunda Rokayah yang senantiasa mendoakan saya
2. Orang tua kedua saya, Ayahanda Padi Winarno dan Ibunda Sholikha yang tiada henti memberi saya semangat
3. Bapak Ibu guru saya sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan saya banyak ilmu.
4. Calon pendamping hidupku Ika Ratna Qorikaten Rohmah dan yang senantiasa menjadi inspirator dalam hidup saya
5. Adik-adik saya Bayu Setiawan, Aditya Yudha Pamungkas dan Andika Nahdatus Sholeh yang senantiasa memberikan keceriaan
6. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali
Kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ”.

(QS Ar-Ra'd ayat 13:11)

”Seberapa besar kesuksesan Anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan Anda,
setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan bagaimana Anda memperlakukan kekecewaan
dalam hidup Anda.” Robert Kiyosaki

”Hadapi masa lalu tanpa penyesalan. Hadapi hari ini dengan tegar dan percaya diri.
Siapkan masa depan dengan rencana yang matang dan tanpa rasa khawatir.” Hary
Tanoesoedibjo, Group President & CEO Mediacom/MNC”

”Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak
penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu
menemukan celah di sekitar hukum.” Plato

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Andy Kurniawan Firmansyah

NIM : 090810101037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Mei 2015

Yang menyatakan,

Andy Kurniawan Firmansyah

NIM 090810101037

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2000-2012**

Oleh

Andy Kurniawan Firmansyah
NIM 090810101037

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sunlip Wibisono, M. Kes.

Dosen Pembimbing II : Drs. P. Edi Suswandi, MP.

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2000-2012
Nama Mahasiswa : Andy Kurniawan Firmansyah
NIM : 090810101037
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan: 7 Mei 2015

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Drs. Sunlip Wibisono, M. Kes.

NIP 195812061986031003

Drs. P. Edi Suswandi, MP.

NIP 195504251985031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M. Kes.

NIP 19641108198902201

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Andy Kurniawan Firmansyah
NIM : 090810101037
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

12 Juni 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Badjuri, M.E
NIP. 195312251984031002 (.....)
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindrartin, M. Kes.
NIP. 19641108198902201 (.....)
3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani, Msi
NIP.196101221987022002 (.....)
4. Pembimbing I : Drs. Sunlip Wibisono, M. Kes.
NIP 195812061986031003 (.....)
5. Pembimbing II : Drs. P. Edi Suswandi, MP.
NIP. 195504251985031001 (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Foto 4 X 6

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE., M.Si
NIP.1963061411990021001

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Andy Kurniawan Firmansyah

*Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Lahirnya desentralisasi fiskal sebagai wujud salah satu kebijakan yang dihasilkan dari otonomi daerah menuntut setiap wilayah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. Banyuwangi sebagai suatu wilayah kabupaten dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya dengan dibantu oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Adanya pengelolaan yang tepat sasaran atas PAD dan dana perimbangan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tersebut, termasuk masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh (PAD) dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data PAD, data dana perimbangan, data jumlah penduduk miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu uji asumsi klasik, analisis deskriptif statistik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD sebesar -0,679 atau -67,9% dengan arah negatif, hal ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan PAD maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. Selain itu nilai koefisien variabel dana perimbangan sebesar -0,563 atau -56,3% dengan arah negatif, yang berarti bahwa setiap adanya kenaikan dana perimbangan maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. Besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel PAD dan Dana Perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 0,848 atau 84,8 %.

Kata kunci :Dana Perimbangan, Desentralisasi Fiskal, Jumlah Penduduk Miskin Otonomi Daerah, PAD

The Influence of District Own Source Revenue and Balance Fund to the Amount of Poverty at Banyuwangi District on 2000-2012 Year

Andy Kurniawan Firmansyah

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

The appearance of fiscal decentralization of one the resulting policy of local autonomy requires each region including Banyuwangi district to finance their needs independently. Banyuwangi as a district is required to produce the high district own source revenue to finance all their needs with the force of balance funds from the central government. The existence of proper management on the district own source revenue and the balance funds by local governments is expected to resolve some of the economic problems in Banyuwangi, including the alleviation amount of poverty. The purpose of this research was to determine the influence of district own source revenue and balance fund to the amount of poverty at Banyuwangi district on 2000-2012. This research is quantitative research. Source of data used secondary data includes district own source revenue data, balance fund, and amount of poverty. The method used in this research is classical assumption, statistical descriptive analysis, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of this research indicate that the value coefficient of district own source revenue variable is -0,679 or -67,9% with a negative direction, which means if each an increase in district own source revenue will affect the amount of poverty reduction. Therefore district own source revenue have significant influence to the number of poverty at Banyuwangi on 2000-2012 year. In addition, the value coefficient of balance fund variable is -0,563 or -56,3% with a negative direction, which means if each of the increase in balance fund will affect the amount of poverty reduction. Therefore the balance fund have significant influence to the amount of poverty at Banyuwangi on 2000-2012 year. The percentage contribution of the influence of district own source revenue variable fund balance variable against poverty at Banyuwangi district is equal to 0,848 or 84,8 %.

Keywords: *Amount of Poverty Balance Fun, District Own Source Revenue, Fiscal Decentralization, Local Autonomy*

RINGKASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012; Andy Kurniawan Firmansyah; 090810101037; 2015; 82 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Adanya otonomi daerah melahirkan berbagai desentralisasi yang salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal ini menuntut setiap wilayah daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. Banyuwangi sebagai suatu wilayah kabupaten dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya. Selain dari PAD pihak pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya melalui dana perimbangan. Keberadaan PAD dan dana perimbangan dalam suatu daerah harus mampu diolah secara tepat oleh pihak pemerintah daerah. Adanya pengelolaan yang tepat sasaran atas PAD dan dana perimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tersebut, termasuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh (PAD) dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data PAD, data dana perimbangan, dan data jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu uji asumsi klasik, analisis deskriptif statistik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan adalah uji F, uji t, dan koefisien determinasi.

Hasil dari hasil analisis regresi berganda menyatakan bahwa jika tidak ada PAD dan Dana Perimbangan maka nilai jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 240631,304 jiwa. Hasil kedua menyatakan bahwa nilai koefisien $-0,679$ pada PAD, menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar $-0,679$. Dan hasil analisis regresi berganda terakhir menyatakan bahwa nilai koefisien $-0,563$ pada Dana Perimbangan, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar $-0,563$.

Hasil dari uji t menyatakan bahwa variabel PAD (X_1) memiliki nilai $t -6,913 > 4,302$ dan signifikansi $0,009 < 0,05$ yang berarti secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. t_{hitung} negatif, maka jika ada peningkatan pada variabel PAD maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Variabel Dana Perimbangan (X_2) memiliki nilai $t -5,858 > 4,302$ dan signifikansi $0,016 < 0,05$ yang berarti secara parsial variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. t_{hitung} negatif, maka jika ada peningkatan pada variabel Dana Perimbangan maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin jumlah penduduk miskin.

Hasil dari uji F menyatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,282 > 19$) dan signifikansi ($0,004 < 0,05$), artinya variabel PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Nilai koefisien determinasi berganda menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel PAD dan Dana Perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi, adalah sebesar $0,848$ atau $84,8\%$ dan sisanya $15,2\%$ dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, jumlah pengangguran, jumlah usaha yang akan memberikan penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan perkapita.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi daya pikir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Sebastiana V, M. Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
3. Bapak Agus Luthfi selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama penulis menimba ilmu telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan motivasi dengan sabar;
4. Bapak Drs. Sunlip Wibisono, M. Kes. Dan Bapak Drs. P. Edi Suswandi, MP. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Drs. H. Badjuri ME., Dra. Nanik Istiyani, MSi., dan Dr. Sebastiana V. Mkes. selaku dosen penguji yang memberikan banyak bimbingan selama ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomi dan Universitas Jember;

7. Ayahanda Agus Wahyono dan Ibunda Rokayah tercinta, yang telah memberikan doa, motivasi, pengorbanan yang tak terhingga baik dari segi moril, intelektual dan materiil selama ini dan hingga saat ini;
8. Orang tua keduku, Ayahanda Padi Winarno dan Ibunda Sholikha yang tiada henti memberi semangat dan doa meski dari kejauhan
9. Pendamping setia setiap langkahku Ika Ratna Qorikaten Rohmah yang tiada hentinya bersabar dan tak pernah mengeluh dalam menghadapi setiap tingkahku
10. Adik-adikku tersayang Bayu Setiawan, Aditya Yudha Pamungkas, dan Andika Nahdatus Sholeh yang selalu menghiburku selama ini disaat rasa jenuh datang;
11. Teman-teman “Rumah Biru” Mas Faisal, Mas Fuad, Mas Sugik, Ali, Rizal, Angel, Astri, Nova, Novi, Fiki, Rofi yang telah memberiku banyak pelajaran hidup selama ini
12. Teman-teman kosan Najib, Fahmi, Haris, Samsul, Arif, Afif, Hadi, Vizarul yang senantiasa mengingatkanku
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia sehingga penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 7 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Bagi Pemerintah Pusat	7
1.4.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	7
1.4.3 Bagi Akademisi	8
1.4.4 Bagi Penulis.....	8

BAB 2. LANDASAN TEORI	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal	9
2.1.2 Otonomi Daerah	10
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.4 Dana Perimbangan	16
2.1.5 Kemiskinan	19
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Teoritis	30
2.4 Hipotesis	31
BAB 3. METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.1.1 Jenis Penelitian	32
3.1.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.1.3 Populasi dan Sampel	33
3.1.4 Variabel Penelitian	33
3.2 Metode Analisis Data	34
3.2.1 Analisis Deskriptif	34
3.2.2 Uji Staitistik	34
3.2.3 Uji Asumsi Klasik	37
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.1.1 Angka Kemiskinan	40
3.1.2 Pendapatan Asli Daerah	40
3.1.3 Dana Perimbangan	40
3.4 Kerangka Pemecahan Masalah	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	42
4.1.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat	43

4.1.3	Aspek Pelayanan Umum	45
4.2	Gambaran Pendapatan, PAD, Dana Perimbangan, dan Angka Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2012	49
4.2.1	Gambaran Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012	49
4.2.2	Gambaran PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012	51
4.2.3	Gambaran Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012	52
4.2.4	Gambaran Angka Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012	53
4.3	Analisis Deskriptif	54
4.4	Uji Statistik	55
4.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda	55
4.4.2	Uji F	56
4.4.3	Uji t	56
4.4.4	Koefisien Determinasi	57
4.5	Uji Asumsi Klasik	57
4.5.1	Uji Normalitas	57
4.5.2	Uji Multikolinieritas	59
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	59
4.5.4	Uji Autokorelasi	60
4.6	Pembahasan	61
4.6.1	Pengaruh PAD Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012	61
4.6.2	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012	64
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Keterbatasan Penelitian	67
5.3	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

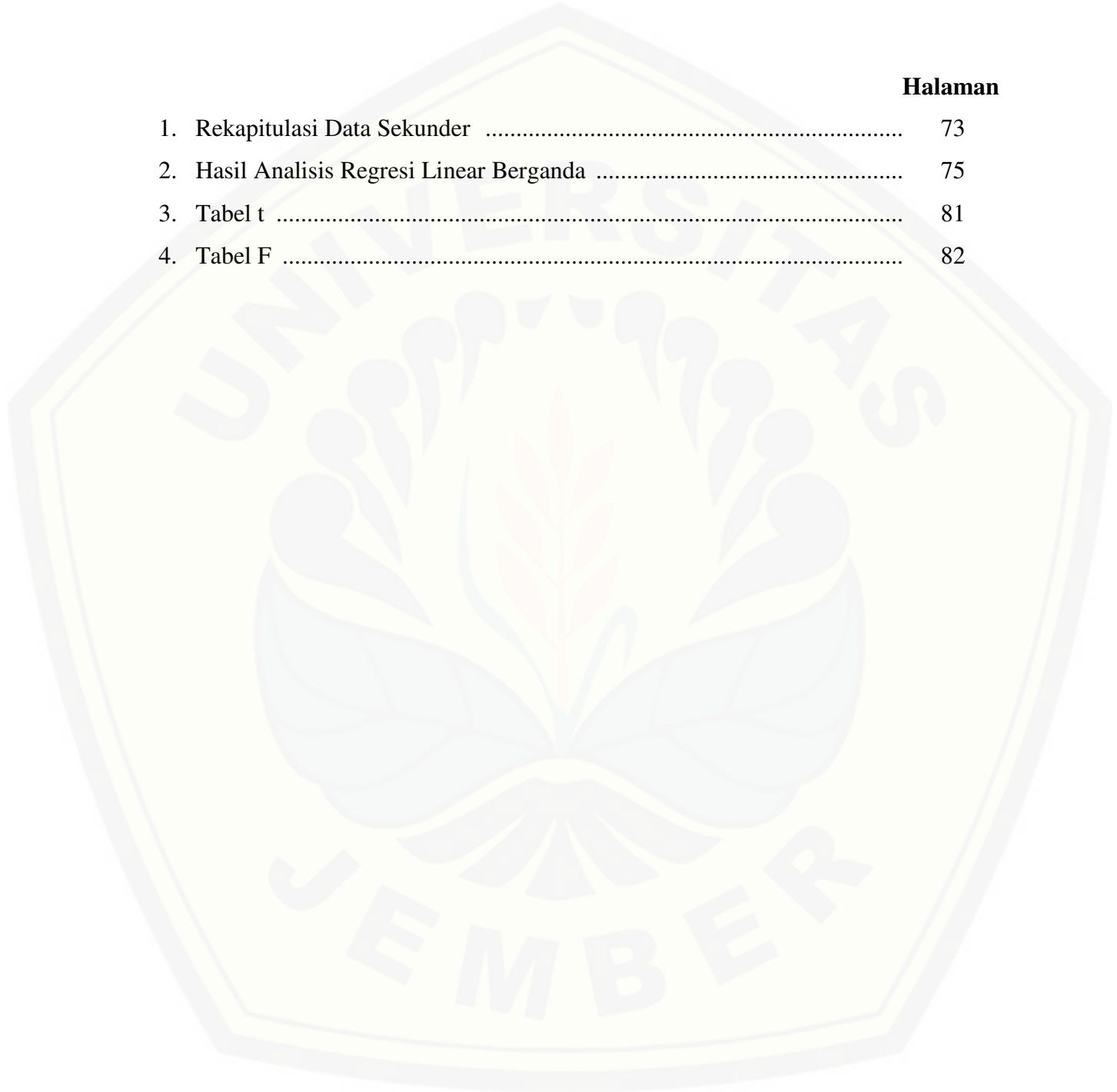
	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	26
4.1 Gambaran Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012 (dalam Rupiah)	50
4.2 Gambaran PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012 (dalam Rupiah) Terdahulu	51
4.3 Gambaran Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012 (dalam Rupiah)	52
4.4 Gambaran Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012.....	53
4.5 Hasil Analisis Deskriptif Statistik	54
4.6 Hasil Regresi Linear Berganda	55
4.7 Hasil Uji Normalitas	58
4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	59
4.9 Hasil Uji Autokorelasi	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Teoritis	31
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	41
4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi	42
4.2 Hasil Uji Normalitas	58
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Rekapitulasi Data Sekunder	73
2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	75
3. Tabel t	81
4. Tabel F	82



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari 34 provinsi. Setiap provinsi yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai Kabupaten dengan potensi yang berbeda-beda. Setiap potensi ini akan menghasilkan berbagai keunggulan yang membedakan Kabupaten tersebut dengan Kabupaten lainnya. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak Kabupaten bagian dengan banyak penduduk. Salah satu Kabupaten bagian dari provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi adalah Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki beberapa potensi wilayah yang dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan, terutama dibidang wisatanya. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi wisata yang besar terutama di bidang wisata pantai. Letak geografis Kabupaten Banyuwangi membawa sebuah keuntungan tersendiri. Keunggulan Kabupaten Banyuwangi di bidang wisata pantai ini menciptakan banyak peluang, apabila dimanfaatkan akan menghasilkan penghasilan. Penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi Kabupaten Banyuwangi sendiri selaku daerah otonom.

Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah otonom termasuk Kabupaten Banyuwangi diatur oleh otonomi daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adanya otonomi daerah melahirkan berbagai bentuk desentralisasi yang salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Munculnya desentralisasi fiskal menuntut setiap wilayah daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. Banyuwangi sebagai suatu wilayah Kabupaten dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya. Selain dari PAD pihak pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya melalui dana perimbangan. Keberadaan PAD dan dana perimbangan dalam suatu daerah harus mampu diolah secara tepat oleh pihak pemerintah daerah. Adanya pengelolaan yang tepat sasaran atas PAD dan dana perimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tersebut. Oleh karena itu setiap perolehan pendapatan baik PAD maupun dana perimbangan oleh pihak Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan sasaran.

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri, melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Menurut Halim (2004:94), "PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa "pendapatan asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah." Dengan adanya potensi wisata pantai yang ada di Kabupaten Banyuwangi tersebut tentunya akan menghasilkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang lebih besar. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa keberadaan potensi wisata wilayah yang strategis pada Kabupaten Banyuwangi tentunya akan menghasilkan PAD yang besar apabila potensi tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.

Pengelolaan potensi wisata wilayah di Kabupaten Banyuwangi secara maksimal akan menghasilkan PAD yang besar pula. Besarnya nilai pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari pengelolaan potensi wilayah tersebut akan menciptakan berbagai peluang positif bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Peluang positif tersebut akan menciptakan berbagai kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan roda pemerintahannya, termasuk untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama menjalankan roda pemerintahan. Selain PAD dana daerah juga ditunjang dengan oleh dana perimbangan

Menurut Bastian (2006: 338), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Lahirnya desentralisasi menuntut pihak pemerintah daerah untuk mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya melalui pengelolaan potensi daerah secara mandiri. Adanya kemandirian daerah dalam mengelola potensinya tersebut tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah. Lahirnya desentralisasi ini tidak hanya menuntut pemerintah daerah untuk mengolah potensinya saja, melainkan juga membiayai kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri. Pemenuhan kebutuhan daerah bukan hanya berasal dari dana mandiri hasil pengelolaan sumber daya daerahnya saja melainkan juga dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai pengeluarannya. Adanya dana transfer dari pemerintah pusat ini akan membantu pemerintah daerah dalam mendanai pemenuhan kebutuhannya.

Dana perimbangan ini dialokasikan kepada daerah-daerah untuk menunjang pendanaan berbagai kebutuhan daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Penggunaan Dana alokasi umum (DAU) diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adanya pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan akan mampu membantu Pemerintah Kabupaten banyuwangi dalam menciptakan inovasi baru dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Inovasi baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Banyuwangi melalui PAD yang dibantu oleh dana perimbangan diantaranya adalah menciptakan berbagai peluang bisnis baru maupun menciptakan kesempatan kerja untuk semua warga kota Banyuwangi. Terciptanya peluang kerja dan kesempatan kerja ini akan mampu memberdayakan masyarakat kota Banyuwangi itu sendiri dan menambah jumlah pendapatan masyarakatnya. Selain itu PAD yang dihasilkan dari pengelolaan potensi wilayah kota banyuwangi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Mudrajad (1997: 102–103), “kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Kemiskinan sendiri dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor baik yang berasal dari diri secara pribadi maupun karena lingkungan. Secara pribadi

kemiskinan terjadi karena tidak adanya keinginan dan motivasi dari diri seseorang untuk merubah nasibnya. Selain itu kemiskinan juga dapat dikarenakan tidak adanya kesadaran dalam diri individu untuk mengenyam bangku pendidikan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah kondisi lingkungan yang sangat mendukung untuk bermalas-malan dan pasrah dengan keadaan. Tidak adanya keterampilan khusus yang dimiliki dan dimanfaatkan juga dapat mendorong terjadinya kemiskinan. Tingginya jumlah penduduk miskin yang terjadi akan menurunkan nilai indeks pembangunan manusia

Meningkatnya nilai kemiskinan akan menurunkan nilai kualitas hidup manusia. Turunnya nilai kualitas hidup akan menurunkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di suatu wilayah tentunya akan menurunkan indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak juga akan menurun. Semakin menurunnya indeks-indeks tersebut maka angka nilai indeks pembangunan manusia akan semakin jauh dari angka standar. Penanggulangan hal tersebut dapat diatasi dengan PAD dan Dana Perimbangan. Adanya pengelolaan PAD dan dana perimbangan secara maksimal akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di suatu wilayah. Pengelolaan PAD dan dana perimbangan guna mengentas kemiskinan akan mampu meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia yang ada di wilayah tersebut.

Adanya pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan untuk mengentas kemiskinan akan meningkatkan nilai indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak, sehingga indeks pembangunannya juga akan semakin meningkat. Pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan secara maksimal dan tepat dapat membawa dampak yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Permasalahan yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin. Apabila semakin tinggi pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin maka nilai kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan semakin menurun tiap

tahunnya. Namun apabila semakin rendah pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi akan cenderung tetap ataupun bahkan meningkat setiap tahunnya.

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis tentang pengaruh pengelolaan PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Penelitian ini digunakan untuk membuktikan apakah pengelolaan PAD dan dana perimbangan akan berdampak atau tidak terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. Berdasarkan pemikiran tersebut dan dilandasi dengan beberapa hasil penelitian yang telah ditemukan berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus atau masalah utama dalam penelitian ini adalah masalah pengaruh PAD dan dana perimbangan, namun karena luasnya ruang lingkup masalah utama maka peneliti membatasi hanya masalah jumlah penduduk miskin, sehingga rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pemerintah Pusat

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan untuk memberikan pembinaan tentang pentingnya pengelolaan PAD dan dana Perimbangan kepada pemerintah daerah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menciptakan peraturan baru yang mewajibkan adanya alokasi dana daerah yang berasal dari PAD dan dana Perimbangan untuk upaya pengentasan kemiskinan

1.4.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

1. Sebagai bahan untuk koreksi atas pengelolaan PAD dan dana Perimbangan daerah Kabupaten Banyuwangi termasuk untuk pengentasan kemiskinan.
2. Sebagai bahan motivasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan PAD dan dana perimbangan serta memaksimalkan pengelolaannya termasuk dalam tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan.
3. Sebagai bahan pedoman untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

1.4.3 Bagi Akademisi

1. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan pembaca berkaitan dengan pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

2. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

1.4.4 Penulis

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memunggut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002:1). Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali untuk urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Departemen Keuangan, mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai

baik yang berasal dari PAD termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Menurut Mudrajad (1996), “desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi / Bantuan dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Bagi pemerintah daerah adanya desentralisasi fiskal ini memiliki fungsi untuk menentukan besarnya jumlah dana yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik, yakni masyarakat. Kepastian akan jumlah alokasi dan mekanisme penyaluran akan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan jenis dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada intinya, desentralisasi fiskal berupaya untuk memberikan jaminan tentang adanya kepastian bagi pemerintah daerah bahwa ada penyerahan kewenangan dan sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan publik dengan standar yang telah ditentukan.

2.1.2 Otonomi Daerah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992) menyatakan bahwa, “otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi.

Digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, makakedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik berbentuk kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan segala urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh hasil pengelolaan sumber daya yang ada di suatu wilayah yang diatur menurut undang-undang.

Menurut Halim (2004:94), “PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.”

Bastian (2001:49) menyatakan, “Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa, “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001:128) “PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.” Dan Bratakusumah & Solihin (2001) menyatakan, “PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut”.

Menurut Rahman (2005:38) menyatakan, “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi”

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli dari wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber-Sumber PAD

Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pembayaran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dibayarkan oleh pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya dana tersebut digunakan sebagai pembangunan daerah tersebut.

Prakosa (2005:2) menyatakan, “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Menurut Halim (2004: 67), “Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.” Menurut UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 “Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.” Sedangkan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009, “Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh perorangan ataupun badan kepada pemerintah daerah yang besar pungutannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh perorangan atau pribadi karena adanya pemakaian hak milik maupun jasa yang berasal dari wilayah atau daerah tersebut.

UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 menyatakan, “Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.”

Menurut Riwo (2005:171), “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya retribusi daerah adalah pungutan yang besarnya ditentukan oleh peraturan daerah, yang dipungut karena adanya perorangan atau badan yang menggunakan jasa atau hak kepemilikan daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

UU No.5 Tahun 1962 menyatakan, “hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi

pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Halim (2004: 69), “pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Menurut Rosalia (dalam Tjokroamidjojo 1984: 160) sumber pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berasal bukan dari pengelolaan kekayaan wilayah daerah, melainkan berasal dari kegiatan-kegiatan lainnya.

2.1.4 Dana Perimbangan

1. Pengertian Dana perimbangan

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Bastian (2006: 338), “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pada Pasal 23 PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH).

2. Jenis-Jenis Dana Perimbangan

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 “DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut . Sidik *et al.* (2004: 152) “DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi

dan kabupaten/kota. DAU bersifat *block Grand* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pembangunan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 bahwa DAU diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Kepres). Dalam Pasal 36 PP 25/2005, Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut PP 55/2005, Pasal 1 "DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Sidik *et.al.* (2004) "DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*). Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 38 bahwa besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pada Pasal 39, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, menerangkan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan

prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Kuncoro (2004) menyatakan, “DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus’. Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain, kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, dan kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK yang dianggarkan dalam APBD. Namun daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Sidik *et al.* (2004: 157) “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Prinsip-prinsip dana bagi hasil adalah pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip

byorigin (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Jenis penerimaan DBH dari sumber daya alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta pertambangan panas bumi

2.1.5 Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dalam pengertian secara umum adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Menurut Dinas Sosial Jawa Timur, definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi sosial menunjukkan ketidakmampuan dalam peran sosial

Menurut Kuncoro (1997: 102–103), “kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.” Dari definisi tersebut Kuncoro menyiratkan tiga pernyataan dasar, yaitu:

- a. Bagaimanakah mengukur standar hidup ?
- b. Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum ?
- c. Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit ?

Menurut BPS (Papua Barat Dalam Angka 2011) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita perhari. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Friedmann (1992: 89) menyatakan, kemiskinan adalah meliputi sebagai berikut.

a. *Powerty line* (Garis Kemiskinan)

Powerty line (garis kemiskinan) yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial. Ia biasanya dihitung berdasarkan income yang dua pertiganya digunakan untuk “*keranjang pangan*” yang dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah.

b. *Absolute and relative poverty* (Kemiskinan Absolut dan Relatif)

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum dan karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan relatif adalah kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin berdasarkan *income* relatif.

c. *Deserving poor*

Deserving poor adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang orang non-miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan.

d. *Target population* (populasi sasaran)

Target population (populasi sasaran) adalah kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni kampung kumuh perkotaan.

Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.” Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kemiskinan dapat ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

The World Bank, 2007 menyatakan, kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari sisi orang miskin itu sendiri; penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil struktur sosial.

Menurut Baswir, (1997: 23), secara sosio- ekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Baswir, 1997: 23).

a. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

b. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir

(1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Selanjutnya Sumodiningrat (1998:27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasmita (1996: 236) hal ini disebut “*accidental poverty*”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam Sumodiningrat. 1998: 150) sebagai suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah. Lain halnya dengan pendapat Chambers yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya, di mana “*deprivation trap*” atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu: Kemiskinan, Kelemahan jasmani, Isolasi, Kerentanan, Ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling kait mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi (Chambers, 1983 : 145-147).

Menurut Sharp, dkk (1996: 173-191) dalam Mudrajad (2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang

timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

3. Mengukur Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Ukuran Garis Kemiskinan Nasional adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk makanan setara 2.100 kilo kalori per orang/hari dan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya.

Biaya untuk membeli 2.100 kilo kalori/hari disebut sebagai Garis Kemiskinan Makanan, sedangkan biaya untuk membayar kebutuhan minimum nonmakanan disebut sebagai Garis Kemiskinan Non-Makanan. Mereka yang pengeluarannya lebih

rendah dari garis kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Standar kemiskinan yang digunakan BPS bersifat dinamis, disesuaikan dengan perubahan/pergeseran pola konsumsi agar realistis.

Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin. Aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni: *anonimitas*, *independensi*, maksudnya ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip *monotonisitas*, yakni bahwa jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. Prinsip *sensitivitas distribusional* menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, jika anda mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin. UNDP selain mengukur kemiskinan dengan parameter pendapatan pada tahun 1997 memperkenalkan apa yang disebut Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) (*Human Poverty Indeks-HPI*) atau biasa juga disebut Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks-HDI*), yakni bahwa kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*), yaitu kehidupan, pendidikan dan ketetapan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul ini, namun cakupan variabel yang digunakan lebih luas, sedangkan penelitian ini lebih

bersifat khusus dan mengerucut yakni hanya meneliti pada pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2008-2012. Berikut adalah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel	Variabel	Hasil Penelitian
1	Hamzah dan Setiyawati (2007)	165 sampel data sekunder atas 33 Provinsi yang diperoleh dari www.bps.co.id dan www.djpk.dep.keu.go.id	Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Independen: PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan	PAD berpengaruh sebesar terhadap kemiskinan sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%. PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Hamzah (2009)	38 daerah Kabupaten di Jawa Timur	Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Publik	PAD dan dana perimbangan secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja publik, PAD dan dana perimbangan secara langsung dan tidak langsung melalui belanja publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran

3	Iskana (2009)	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur	<p>Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran</p> <p>Independen: Pengaruh Belanja dan Pendapatan</p>	Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran
4	Santosa (2013)	165 sampel data sekunder atas 33 Provinsi yang diperoleh dari www.bps.co.id dan www.djpk.dep.keu.go.id	<p>Dependen: Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan</p> <p>Independen: Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan</p>	PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah.
5	Astuti (tidak dipublikasikan)	Desa yang menerima PNPM Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP), PNPM Mandiri NonSPP, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kebumen tahun 2009-2011 yang berjumlah 226 desa.	<p>Dependen: Jumlah kepala Keluarga Miskin</p> <p>Independen: PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Jumlah Penduduk</p>	Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin per desa di Kabupaten Kebumen tahun 2009-2011. Hal ini berarti, ketika jumlah PAD desa bertambah besar, maka jumlah KK miskin berkurang. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat peran penting PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus menggali potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, supaya jumlah PAD meningkat

6	Ani dan Dwirandra (2014)	8 kabupaten dan 1 kota pada Provinsi Bali dengan objek penelitian yaitu kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan tahun 2007-2011	<p>Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran</p> <p>Independen: Kinerja Keuangan Daerah</p>	Kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian antara kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, dan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
---	--------------------------	--	---	--

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi, 2014

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu: sama-sama menganalisis tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengamati apakah terdapat pengaruh atas PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, objek, serta sampelnya. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini

adalah variabel PAD dan dana perimbangan, sedangkan variabel dependen yang diteliti hanya satu yakni jumlah penduduk miskin saja. Objek penelitian ini menggunakan kabupaten Banyuwangi, hal ini dikarenakan Banyuwangi memiliki progres pendapatan asli daerah yang lumayan tinggi di provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data *time series* yang meliputi data PAD, dana perimbangan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi yang dimulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012.

2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini dibuat berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan suatu pengamatan atau penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut akan menggambarkan dan memuat secara runtut kronologis yang akan dibahas dalam penelitian atau pengamatan untuk mencapai suatu tujuan. Kabupaten Banyuwangi yang memiliki banyak potensi wisata serta potensi sumber daya alam lainnya akan menghasilkan pendapatan yang besar atas pengelolaan sumber daya tersebut. Adanya otonomi daerah di negara Indonesia, menimbulkan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala urusannya, termasuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Munculnya otonomi daerah ini memunculkan lahirnya sistem desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali untuk urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Salah satu bentuk dari desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Adanya desentralisasi fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kebebasan dalam mengolah sumber daya yang ada secara maksimal. Pengelolaan sumber daya ini nantinya akan menghasilkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Banyuwangi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain itu pendanaan pemerintah daerah juga tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat akan menambah jumlah keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan daerah yang telah diprioritaskan. Dana PAD dan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah nantinya akan digunakan untuk mensejahterkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat ini akan tercipta apabila setiap masyarakatnya hidup dengan layak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan adalah dengan berkurangnya angka kemiskinan yang ada.

Berikut gambar kerangka teoritis secara keseluruhan:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 PAD Berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah haruslah dikelola dengan pihak Pemerintah Daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah secara maksimal akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah itu

sendiri. Dana pendapatan asli daerah dapat dikelola untuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan diperoleh ketika pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan public yang memuaskan.

Bagi pemerintah daerah adanya desentralisasi fiskal ini memiliki fungsi untuk menentukan besarnya jumlah dana yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik, yakni masyarakat. Adanya desentralisasi fiskal ini membuat pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Pengelolaan keuangan secara mandiri ini akan memberikan peluang bagi pihak pemerintah daerah berinovasi dalam menjalankan pelayanan publik. Salah satunya melalui pengelolaan pendapatan asli daerah yang diperoleh.

Pengelolaan PAD diharapkan akan mampu mensejahterakan masyarakat, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di suatu daerah. Tingginya PAD yang diperoleh suatu daerah memberikan banyak pilihan bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi perekonomian termasuk dengan menciptakan industry-industri kreatif yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap ini akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Apabila masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Setiyawati (2007) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh sebesar terhadap kemiskinan sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%. Penelitian Hamzah (2009) menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan secara langsung dan tidak langsung melalui belanja publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Iskana (2009) Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran

Selain itu penelitian Astuti (tidak dipublikasikan) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin per desa di Kabupaten Kebumen tahun 2009-2011. Hal ini berarti, ketika jumlah PAD desa bertambah besar, maka jumlah KK miskin berkurang. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat peran penting PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus menggali potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, supaya jumlah PAD meningkat kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H_1 : PAD Berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

2.4.2 Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan ini merupakan salah satu bentuk pendanaan yang

diterima oleh pihak pemerintah daerah dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk memperbaiki infrastruktur daerah guna terciptanya pemerataan.

Bagi pemerintah daerah adanya desentralisasi fiskal ini memiliki fungsi untuk menentukan besarnya jumlah dana yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik, yakni masyarakat. Adanya desentralisasi fiskal ini membuat pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Pengelolaan keuangan secara mandiri ini akan memberikan peluang bagi pihak pemerintah daerah untuk memperbaiki segala bentuk infrastruktur daerah dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Salah satunya melalui pengelolaan dana perimbangan yang diperoleh.

Pengelolaan dana perimbangan secara tepat akan mampu mensejahterakan masyarakat, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di suatu daerah. Tingginya nilai dana perimbangan yang diperoleh suatu daerah memberikan banyak kesempatan bagi pihak pemerintah daerah untuk memperbaiki berbagai fasilitas pelayanan kepada publik. Fasilitas public yang dapat ditingkatkan salah satunya adalah akses transportasi. Semakin baiknya akses transportasi yang ada di suatu daerah membuat masyarakatnya semakin mudah bermobilitas. Baiknya akses mobilitas ini akan mendukung aktivitas masyarakat terutama kegiatan ekonomi. Semakin mudahnya akses transportasi yang ada maka masyarakat tidak hanya dapat bekerja di daerahnya saja, melainkan juga dapat bekerja di daerah lain. Apabila masyarakat dapat bekerja dengan baik di dalam maupun di luar daerah mereka maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Setiyawati (2007) menunjukkan bahwa DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%. Penelitian Hamzah (2009) menyatakan bahwa PAD dan dana perimbangan secara langsung dan tidak langsung melalui belanja publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap suatu masalah dalam bentuk fakta-fakta dari suatu populasi yang biasanya berkaitan dengan opini dari individu atau kelompok dengan cara menjelaskan secara jelas. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan cara mengukur variabel yang berupa angka-angka dan melalui analisis data dengan prosedur ketentuan statistik. Dalam penelitian ini nantinya menjelaskan seberapa besar pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012

3.1.2 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Data sekunder yang diperlukan berbentuk data kurun waktu (*time series*) tahunan untuk tahun 2000-2012 dari variabel yang digunakan. Data yang dimaksud diatas meliputi data jumlah penduduk miskin, data PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah, dan data dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2000 sampai tahun 2012. Sumber data penelitian ini diperoleh dari BPS Kabupaten Banyuwangi, BPS Provinsi Jawa Timur, RPJM Kabupaten Banyuwangi dan literatur lainnya.

3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian skripsi ini adalah data-data variabel penelitian yang meliputi PAD, dana perimbangan dan jumlah penduduk miskin di kabupaten Banyuwangi. Sugiyono (2012:116) menyatakan, “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis. Sampel penelitian yang diambil adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Data tersebut berasal dari sumber literatur yang telah ditentukan.
2. Data yang digunakan tersebut meliputi data jumlah penduduk miskin, PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan, DAU, DAK, dan DBH Kabupaten Banyuwagi.
3. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2000-2012.

3.1.4 Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen bebas (Sugiono, 2009). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif

ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya (Mudrajad, 2003). Dalam penelitian ini variabel bebas atau variabel independennya adalah PAD dan dana perimbangan.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12).

3.2.2 Uji Staitistik

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mngetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut *independent variable* (variabel bebas) dan variabel yang mempengaruhi disebut *dependent variable* (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat salah satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai regresi sederhana, sedangkan jika variabelnya bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda (Prayitno, 2010:61). Untuk mengetahui pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012, digunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut (Prayitno, 2010:61) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Angka Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi
α	= Konstanta
β_1, β_2	= Koefisien Regresi
X_1	= PAD
X_2	= Dana Perimbangan
e	= <i>Standar Error</i>

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah :

a. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat (Prayitno, 2010:67). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel X_1 , dan X_2 , secara simultan terhadap variabel Y . Tahapan yang dilakukan dalam uji ini adalah:

1) Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

a) $H_0 : b_1, b_2 = 0$

Tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X_1 , dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)

b) $H_a : b_1, b_2 \neq 0$

Ada pengaruh simultan antara variabel bebas (X_1 , dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)

2) Mencari F hitung

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1 - R^2/(n-k)}$$

Keterangan :

F = pengujian secara simultan

R^2 = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel

n = banyaknya sampel

3) Kriteria pengujian

a) Taraf signifikan $\alpha = 5\%$

b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima

c) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ Maka H_0 diterima dan H_a ditolak

4) Derajat pembilang (df_1) = k

5) Derajat penyebut (df_2) = $n-k-1$

b. Uji t

Menurut Sarwono (2005:89) “Uji t (*t Test*) adalah untuk membandingkan rata-rata dua sampel. Pengujian ini dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan apakah suatu dugaan hipotesis tersebut sebaiknya diterima atau ditolak”. Sarwono (2005:157) tahapan yang dilakukan dalam uji ini adalah:

1) Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

a) $H_0 : b_i = 0$ (tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen)

b) $H_a : b_i \neq 0$ (ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen)

2) Mencari t hitung

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{Se_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = koefisien regresi dari variabel i

Se_{b_i} = standar error dari b_i

3) Kriteria pengujian

- c) Taraf signifikan $\alpha = 5\%$
- d) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- e) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ Maka H_0 diterima dan H_a ditolak

4) Derajat Kebebasan (dk) t_{tabel} adalah $n - 1$ 3. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi adalah data untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut bisa dibenarkan. Dari koefisiensi determinasi (R^2) dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y (Prayitno, 2010:66).

$$R^2 = \sum Y \frac{b^1 \sum X_1 Y + b^2 \sum X_2 Y + b^3 \sum X_3 Y + b^4 \sum X_4 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan :

- R^2 = Koefisien determinasi berganda
- Y = Variabel terikat (*dependent*)
- X = Variabel bebas (*Independent*)

3.2.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Metode ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain : data berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi.

1. Uji Normalitas

“Menurut Ghozali (2007 :110) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.” Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini adalah uji normalitas atau sampel Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Uji normalitas memiliki kriteria pengambilan keputusan

- a. Apabila angka signifikansi (Sig) $> \alpha = 0,05$ maka data berdistribusi normal dan H_0 diterima
- b. Apabila angka signifikansi (Sig) $< \alpha = 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal dan H_0 ditolak

Menurut Latan, (2013: 42) “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik Dasar pengambilan keputusan antara lain

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

2. Uji Multikolinearitas

“Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2007:105)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model ini ialah dengan

melihat R^2 , atau berpatokan pada nilai tolerance dan VIF (Ghozali, 2007). Uji multikolinearitas dapat dilakukan untuk hasil regresi untuk kedua model yang akan diestimasi. Caranya adalah dengan mencari angka *tolerance*, dimana *tolerance* adalah nilai $1-R^2$. Setelah angka *tolerance* diperoleh selanjutnya dicari angka VIF. Angka VIF (*variance inflation factor*) yang merupakan kebalikan (resiprokal) dari *tolerance*. Dengan demikian semakin tinggi nilai *tolerance* semakin rendah derajat kolinearitas yang terjadi. Sedangkan untuk VIF, semakin rendah nilai VIF semakin rendah derajat kolinearitas yang terjadi. Batasan nilai maksimum VIF yang biasa digunakan untuk menjustifikasi adanya kolineritas adalah 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:66). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a. Jika ada pola tertentu. seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson (D-W)* untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson statistik terletak -2 sampai dengan +2 maka

tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5% (Sarwono, 2013:52).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Jumlah Penduduk Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Pengukuran angka kemiskinan dilakukan melalui skala nominal.

3.3.2 Pendapatan Asli Daerah

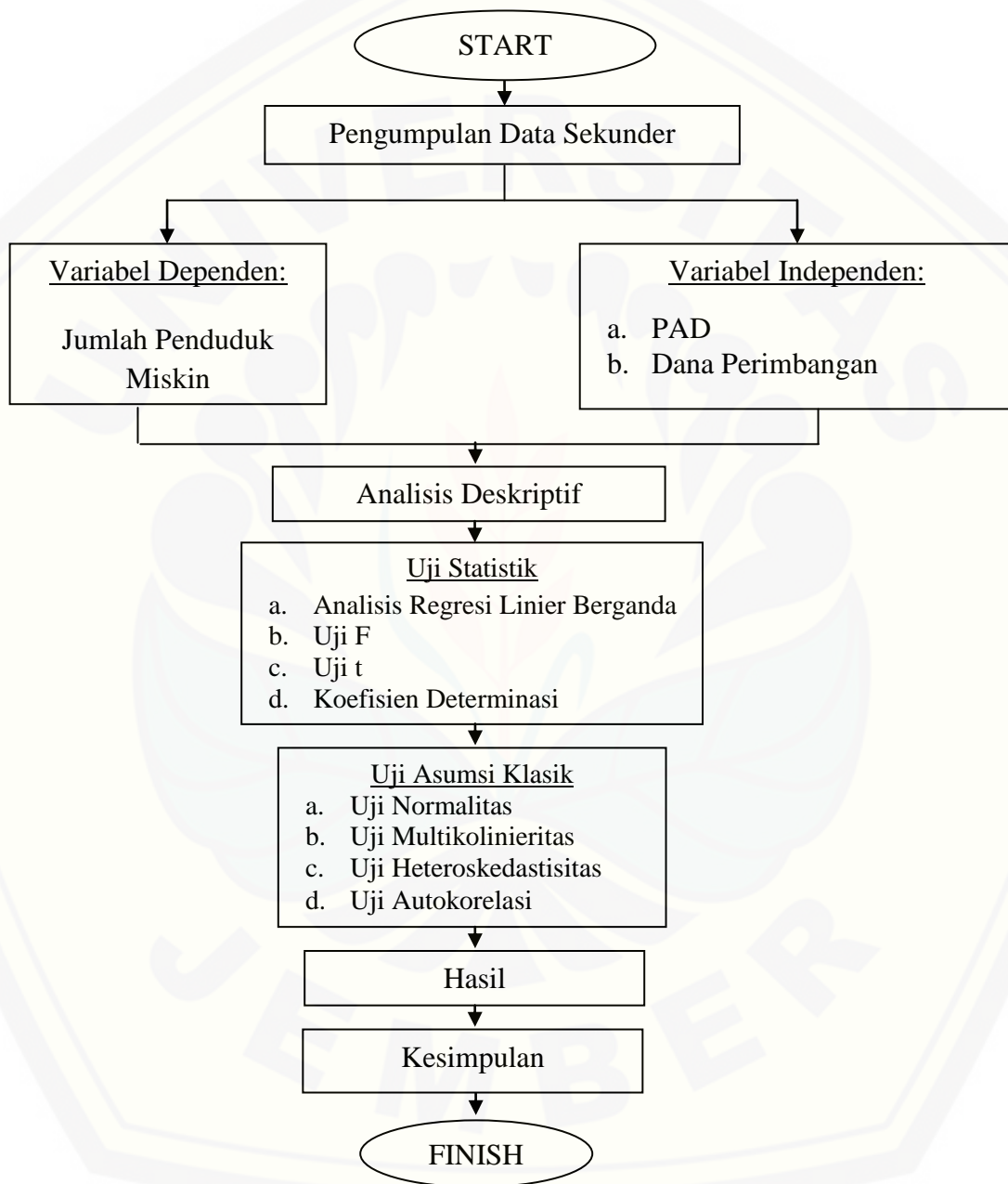
Pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi wilayah asli daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penghasilan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Pengukuran indikator PAD adalah dengan menggunakan skala nominal skala nominal.

3.3.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pengukuran indikator dana perimbangan adalah dengan menggunakan skala nominal skala nominal.

3.4 Kerangka Pemecahan Masalah

Guna mempermudah dan memperjelas dalam pemecahan masalah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



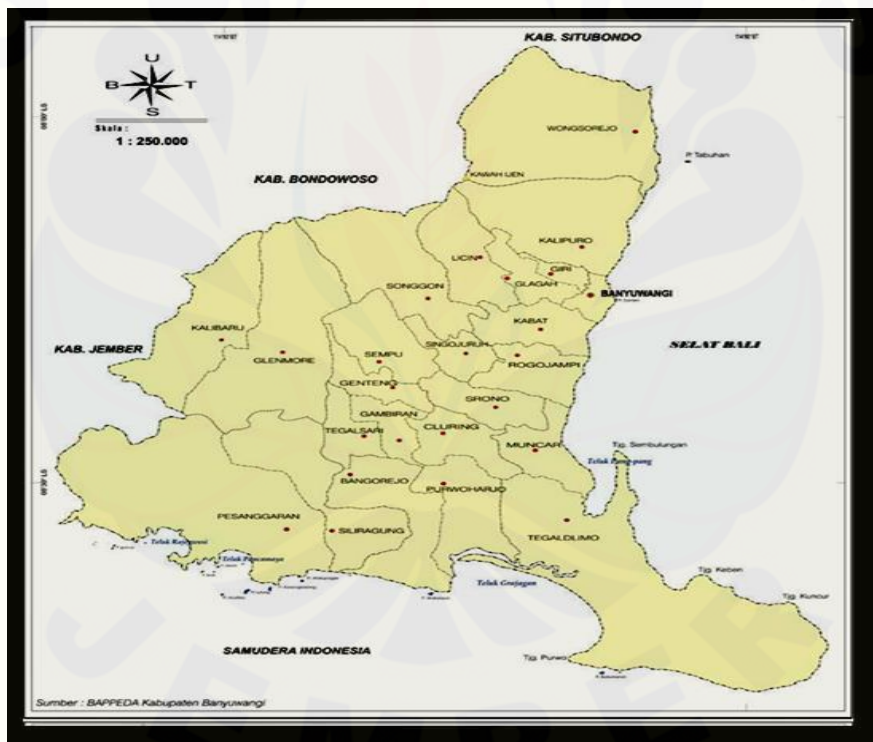
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Ujung Timur Pulau Jawa secara geografis terletak pada posisi strategis pada koordinat di antara $7^{\circ} 43'$ - $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ - $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Panjang garis pantai membentang mulai dari Kecamatan Wongsorejo di sebelah utara sampai dengan Kecamatan Pesanggaran di sebelah selatan diperkirakan mencapai 175,8 km.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi

Batas-batas Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Situbondo;
2. Sebelah timur dengan Selat Bali;
3. Sebelah selatan dengan Samudera Indonesia;
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782.50 Km² yang sebagian besar merupakan kawasan hutan seluas 183.396,34 ha atau 31,72%, areal persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, kawasan perkebunan mencapai sekitar 82.143,63 ha atau 14,2%. Sedangkan areal yang dimanfaatkan permukiman sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%, sedangkan areal sisanya dipergunakan untuk berbagai manfaat antara lain, jalan, ladang dan lainnya.

4.1.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi sampai tahun 2012 masih didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan salah satu pembentuk PDRB Kabupaten Banyuwangi yang selalu stabil mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Dominasi kedua pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Angkanya bisa diinterpretasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 sekitar lebih dari seperempat persennya bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini merupakan mata rantai dari seluruh sektor produksi di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan dan restoran di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Urutan ketiga sektor jasa-jasa, pada tahun 2012 sektor jasa-jasa semakin tumbuh dan mantap, seiring dengan kemajuan di bidang perdagangan dan industri, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Dampak dari itu, kebutuhan akan jasa

juga meningkat. Dengan demikian sektor inipun mulai bergerak seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dan keempat sektor industri pengolahan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di Kabupaten Banyuwangi tidak bisa lepas dari peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi perkembangan kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha industri pengolahan.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan persentase jumlah pengangguran. APK SD/MI pada tahun 2012 sebesar 102,91. Sementara itu APM SD/MI sebesar 98,10. Selanjutnya, angka putus sekolah untuk SD/MI pada tahun 2012 sebesar 0,44 tercapai sesuai target. APK SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 101,44, sementara itu APM SMP/MTs sebesar 84,32. Hal ini mengartikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengejar ketertinggalan pembangunan manusia bidang pendidikan relatif cukup baik.

Tahun 2012 AHH penduduk Kabupaten Banyuwangi terukur 67,98 tahun. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyuwangi relatif jauh lebih panjang dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup penduduk kabupaten tetangga, yaitu Jember, Bondowoso dan Situbondo. Dari gambar tersebut, angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2012 sebesar 65,6 Per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tergolong cukup besar, namun masih dibawah target nasional yaitu 105 Per 100.000 kelahiran hidup.

3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dukungan dalam pelestarian budaya dan kemajuan olahraga dapat direalisasikan dalam beberapa hal. Beberapa diantaranya adalah jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, situs-situs bersejarah yang ditangani, jumlah klun

olahraga, dan jumlah gedung olahraga sebagai penunjang kegiatan olahraga. Indikator-indikator tersebut tidak lain digunakan untuk mengukur seberapa besar capaian kinerja dari bidang seni budaya dan olahraga yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Secara umum, realisasi dari indikator seni budaya dan olahraga sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerjanya sebesar 100%, bahkan capaian kinerja untuk indikator jumlah klub olahraga mencapai 4.630%. Hal ini menandakan bahwa kinerja pemerintah di bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi sangat baik.

4.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai salah satu misi Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD yakni “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”. Salah satu sasaran dalam bidang pendidikan adalah menurunnya buta aksara dimana indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya Angka Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Murni. Pada tahun 2012, dari 8 indikator kinerja sasaran, 6 indikator diantaranya mencapai >100%, 1 indikator mencapai 100% yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan 1 indikator mencapai 94,71% yaitu Angka Partisipasi Kasar SD/MI.

Capaian kinerja sasaran tahun 2012 mencapai 102,91%, lebih rendah dibandingkan capaian kinerja sasaran tahun 2011 yang mencapai 106,68 %. Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya partisipasi pendidikan yang diukur dari indikator angka partisipasi sekolah, angka ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata, angka kelulusan, angka melanjutkan, dan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran

meningkatnya partisipasi pendidikan tahun 2012 mencapai 102,56% dimana capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya (2011) yang sebesar 97,81%. Sasaran yang ketiga untuk bidang pendidikan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Rata-rata capaian kinerja dari sasaran tersebut sebesar 162,98%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat di Kabupaten Banyuwangi.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu dari sembilan misi Kabupaten Banyuwangi yakni “Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal”. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian bayi. Disamping angka kematian bayi, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian ibu. Berbeda dengan trend angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan mengalami trend yang semakin menurun. Indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan dengan sebesar 70 KH pada tahun 2012.

Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dari insan-insan tenaga kesehatan (bidan) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat saat proses melahirkan, disamping kesadaran masyarakat untuk menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang sudah ada. kematian bayi. Secara umum, trend capaian angka kematian bayi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan. Namun, capaian ini tergolong lebih rendah dari target yang ditetapkan, yakni 30 KH pada tahun 2012 sehingga capaian kinerjanya sebesar 322,58 persen. Kemudian, indikator lain yang digunakan dalam mengukur kinerja urusan kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Capaian indikator ini tergolong tidak lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2011. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012, capaian ini terbilang lebih baik. Capaian keberhasilan target yang telah ditetapkan tersebut tidak lepas dari kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dari sisi jangkauan kesehatan, secara umum indikatornya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan puskesmas, dimana pada tahun 2011, realisasi cakupan puskesmas sebesar 100 persen, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sehingga capaiannya sebesar 187,5 persen. Begitu pula dengan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk cakupan puskesmas pembantu capaian dan realisasinya pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011. Sedangkan untuk rasio rumah sakit per 10.000 penduduk pada tahun 2012 capaiannya sebesar 100 persen, dengan rasio 1:14,53 (persen).

3. Pekerjaan Umum

Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah kabupaten Banyuwangi yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Urusan Pekerjaan Umum mengemban beberapa sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata pada tahun 2012, meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2012, Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai capaian yang baik sekali karena mencapai 97,50%, meskipun capaian ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang dapat mencapai 100%. Capaian kinerja rasio tempat ibadah per satuan penduduk mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 yang mencapai 100%, yaitu tembus ke angka 102,35% pada tahun 2012. Capaian kinerja

indikator persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 56,05% pada tahun 2012, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 100%. Sementara rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi capaian kinerjanya tetap 100% sama seperti tahun sebelumnya.

4. Ketenagakerjaan

Sasaran dalam urusan ketenagakerjaan adalah menurunnya tingkat pengangguran. Sasaran tersebut dapat diukur dengan beberapa indikator seperti Angka partisipasi angkatan kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, dan Tingkat pengangguran terbuka. Seluruh indikator tersebut telah memenuhi target pada tahun 2012, sehingga jika realisasi yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah diperkirakan maka capaiannya lebih dari 100 persen. Selain pemenuhan capaian dari target yang telah ditetapkan, perkembangan indikator angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2008-2012 secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga diiringi dengan penurunan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana pada tahun 2012 capaiannya sebesar 3,71 persen lebih rendah 0,24 persen dibandingkan dengan tahun 2011.

5. Ketahanan Pangan

Penyelenggaran urusan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain produksi gabah, beras, dan ketersediaan pangan. Indikator ini tidak lain bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Produksi pangan utama berupa gabah maupun beras di Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahun mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012, capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,08 persen.

Tidak tercapainya indikator sasaran ini, disebabkan oleh beberapa hal yang meliputi:

- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat, sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian secara sistematis dan bersifat permanen;
- b. Terjadi alih fungsi komoditi tanaman pangan ke hortikultura, sehingga menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan.
- c. Terjadinya serangan organisme pengganggu tanamanyang semakin meningkat dan bersifat sporadis, sehinggamempengaruhi produksi dan kualitas tanaman;
- d. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah dan produktivitas lahan karena penggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan.
- e. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian terutama dalam pemakaian pupuk berimbang dan penggunaan benih unggul bersertifikat.

Peningkatan produksi beras maupun gabah di Kabupaten Banyuwangi dikuatkan dengan persentase ketersediaan pangan utama Kabupaten Banyuwangi, dimana pada tahun 2012 capaiannya sebesar 317,51 persen yang mengalami peningkatan 46,43 persen dibandingkan dengan tahun 2011.

4.2 Gambaran Pendapatan, PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

4.2.1 Gambaran Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi tiga bagian. Menurut data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi pendapatan yang diperoleh terbagi dalam tiga sumber yakni PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, Berdasarkan kegiatan pengumpulan data sekunder yang telah dilakukan, didapati gambaran pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berikut data pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012.

Tabel 4.1 Gambaran Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2000-2012

Tahun	Total Pendapatan	Pendapan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2000	Rp 677.158.535.911,59	Rp 23.624.076.936,95	Rp 619.027.839.540,78	Rp 34.506.619.433,86
2001	Rp 712.072.768.873,56	Rp 28.112.808.650,01	Rp 647.846.874.323,75	Rp 36.113.085.899,80
2002	Rp 740.185.577.523,57	Rp 31.950.487.475,93	Rp 670.840.277.293,12	Rp 37.394.812.754,52
2003	Rp 772.136.064.999,50	Rp 36.279.146.639,61	Rp 697.003.673.070,49	Rp 38.853.245.289,40
2004	Rp 808.415.211.639,11	Rp 42.387.989.371,05	Rp 725.580.984.932,31	Rp 40.446.237.335,75
2005	Rp 850.803.201.010,16	Rp 48.426.743.760,78	Rp 760.010.980.306,61	Rp 42.365.476.942,77
2006	Rp 899.229.944.770,94	Rp 56.487.590.754,76	Rp 798.245.557.724,13	Rp 44.496.796.292,05
2007	Rp 955.717.535.525,70	Rp 64.641.936.972,16	Rp 844.026.806.949,91	Rp 47.048.791.603,63
2008	Rp 1.020.359.472.497,86	Rp 73.970.832.546,54	Rp 940.565.487.465,00	Rp 5.823.152.486,32
2009	Rp 1.143.692.289.989,91	Rp 86.977.565.944,72	Rp 1.036.440.536.941,85	Rp 20.274.187.103,34
2010	Rp 1.205.516.033.872,32	Rp 87.307.973.996,32	Rp 927.297.552.851,00	Rp 190.910.507.025,00
2011	Rp 1.211.463.764.985,00	Rp 91.305.508.317,00	Rp 954.894.237.247,00	Rp 165.264.019.421,00
2012	Rp 1.241.077.787.152,28	Rp 115.406.002.506,00	Rp 957.142.909.406,63	Rp 168.528.875.239,65

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000 adalah Rp 677.158.535.911,59 yang terdiri atas PAD sebesar Rp 23.624.076.936,95, dana perimbangan sebesar Rp 619.027.839.540,78 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 34.506.619.433,86. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 712.072.768.873,56 yang terdiri atas PAD sebesar Rp 28.112.808.650,01, selanjtnya dana perimbangan sebesar Rp 647.846.874.323,75 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 36.113.085.899,80. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002 memiliki jumlah sebesar Rp 740.185.577.523,57 yang terdiri atas PAD sebesar Rp 31.950.487.475,93, dana perimbangan sebesar Rp 670.840.277.293,12 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 37.394.812.754,52. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 772.136.064.999,50 yang terdiri atas PAD dengan jumlah sebesar Rp 36.279.146.639,61, dana perimbangan sebesar Rp 697.003.673.070,49 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 38.853.245.289,40.

Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2004 Rp 808.415.211.639,11 yang terdiri atas PAD yakni sebesar Rp 42.387.989..371,05, dana perimbangan sebesar Rp 725.580.984.932,31, serta lain-lain pendapatan yang sah yakni dengan jumlah Rp 40.446.237.335,75. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 850.803.201.010,16 yang terdiri atas PAD dengan jumlah sebesar Rp 48.426.743.760,78, dana perimbangan Rp 760.010.980.306,61 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 42.365.476.942,77. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 899.229.944.770,94 yang terdiri atas PAD Rp 56.487.590.754,76, dana perimbangan Rp 798.245.557.724.13 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 44.496.796.292,05. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 955.717.535.525,70 yang terdiri atas PAD sebesar Rp 64.641.936.972,16, kemudian dana perimbangan memiliki jumlah sebesar Rp 844.026.806.949,91 dan lain-lain pendapatan yang sah dengan jumlah sebesar Rp 47.048.791.603,63.

Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2008 Rp 1.020.359.472.497,86 yang terdiri atas PAD yakni sebesar Rp 73.970.832.546,54, dana perimbangan sebesar Rp 940.565.487.465,00, serta lain-lain pendapatan yang sah yakni dengan jumlah Rp 5.823.152.486,32. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 1.143.692.289.989,91 yang terdiri atas PAD dengan jumlah sebesar Rp 86.977.565.944,72, dana perimbangan Rp 1.036.440.536.941,85 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 20.274.187.103,34. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.205.516.033.872,32 yang terdiri atas PAD Rp 87.307.973.996,32, dana perimbangan Rp 927.297.552.851,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 190.910.507.025,00. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.211.463.764.985,00 yang terdiri atas PAD sebesar Rp 91.305.508.317,00, kemudian dana perimbangan memiliki jumlah sebesar Rp 954.894.237.247,00 dan lain-lain pendapatan yang sah dengan jumlah sebesar Rp 165.264.019.421,00. Total pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.241.077.787.152,28 yang terdiri atas PAD sebesar Rp 115.406.002.506,00, kemudian dana perimbangan memiliki jumlah sebesar Rp 957.142.909.406,63 dan lain-lain pendapatan yang sah dengan jumlah sebesar Rp 68.528.875.239,65.

4.2.2 Gambaran PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi diperoleh terbagi dari empat sumber yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan kegiatan pengumpulan data sekunder yang telah dilakukan, didapati gambaran PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Berikut data PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012

Tabel 4.2 Gambaran PAD Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2000-2012

Tahun	Total PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2000	Rp 23.624.076.936,95	Rp 7.940.052.258,51	Rp 10.144.178.636,73	Rp 2.145.066.185,88	Rp 3.394.779.855,84
2001	Rp 28.112.808.650,01	Rp 9.448.714.987,27	Rp 12.071.640.034,31	Rp 2.552.643.025,42	Rp 4.039.810.603,01
2002	Rp 31.950.487.475,93	Rp 10.738.558.840,66	Rp 13.719.539.322,16	Rp 2.901.104.262,81	Rp 4.591.285.050,29
2003	Rp 36.279.146.639,61	Rp 12.193.421.185,57	Rp 15.578.265.567,05	Rp 3.294.146.514,88	Rp 5.213.313.372,11
2004	Rp 42.387.989.371,05	Rp 14.246.603.227,61	Rp 18.201.402.635,93	Rp 3.848.829.434,89	Rp 6.091.154.072,62
2005	Rp 48.426.743.760,78	Rp 16.276.228.578,00	Rp 20.794.443.770,88	Rp 4.397.148.333,48	Rp 6.958.923.078,42
2006	Rp 56.487.590.754,76	Rp 18.985.479.252,67	Rp 24.255.771.470,09	Rp 5.129.073.240,53	Rp 8.117.266.791,46
2007	Rp 64.641.936.972,16	Rp 21.726.155.016,34	Rp 27.757.247.735,85	Rp 5.869.487.877,07	Rp 9.289.046.342,90
2008	Rp 73.970.832.546,54	Rp 20.482.523.532,14	Rp 20.334.581.867,04	Rp 8.965.264.904,64	Rp 24.188.462.242,72
2009	Rp 86.977.565.944,72	Rp 21.483.458.788,35	Rp 30.772.662.831,24	Rp 7.984.540.553,73	Rp 26.728.206.014,81
2010	Rp 87.307.973.996,32	Rp 22.473.072.506,65	Rp 33.072.260.549,81	Rp 10.546.803.258,76	Rp 21.207.106.883,71
2011	Rp 91.305.508.317,00	Rp 23.458.553.810,00	Rp 20.762.677.017,00	Rp 13.337.736.000,00	Rp 33.746.541.490,00
2012	Rp 115.406.002.506,00	Rp 35.611.451.855,68	Rp 25.578.138.443,12	Rp 15.946.498.700,25	Rp 38.269.913.506,95

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 23.624.076.936,95 yang terdiri atas pajak daerah sebesar Rp 7.940.052.258,51, retribusi daerah sebesar Rp 10.144.178.636,73, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2.145.066.185,88, dan lain-lain PAD yang sah Rp 3.394.779.855,84. PAD Kabupaten Banyuwangi tahun 2001 adalah Rp 28.112.808.650,01 yang terdiri atas pajak daerah Rp 9.448.714.987,27, retribusi daerah sebesar Rp 12.071.640.034,31, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2.552.643.025,42, dan lain-lain PAD yang sah Rp 4.039.810.603,01. PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 31.950.487.475,93 yang terdiri atas pajak daerah sebesar Rp 10.738.558.840,66, retribusi daerah sebesar Rp 13.719.539.322,16, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2.901.104.262,81, dan lain-lain PAD yang sah Rp 4.591.285.050,29. PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 36.279.146.639,61 yang terdiri atas pajak daerah Rp 12.193.421.185,57, retribusi daerah sebesar Rp 15.578.265.567,05, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3.294.146.514,88, dan lain-lain PAD yang sah Rp 5.213.313.372,11.

PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 adalah Rp 42.387.989.371,05 yang terdiri atas pajak daerah sebesar Rp 14.246.603.227,61, retribusi daerah sebesar Rp 18.201.402.635,93, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3.848.829.434,89, dan lain-lain PAD yang sah Rp 6.091.154.072,62. PAD Kabupaten Banyuwangi tahun 2005 adalah Rp 48.426.743.760,78 yang terdiri atas pajak daerah Rp 16.276.228.578,00, retribusi daerah sebesar Rp 20.794.443.770,88, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 4.397.148.333,48, dan lain-lain PAD yang sah Rp 6.958.923.078,42. PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2006 adalah Rp 56.487.590.754,76 terdiri atas pajak daerah Rp 18.985.479.252,67, retribusi daerah sebesar Rp 24.255.771.470,09, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai sebesar Rp 5.129.073.240,53, dan lain-lain PAD yang sah Rp 8.117.266.791,46. PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 64.641.936.972,16 yang terdiri atas pajak daerah Rp 21.726.155.016,34,

retribusi daerah sebesar Rp 27.757.247.735,85, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai sebesar 5.869.487.877,07, dan lain-lain PAD yang sah Rp 9.289.046.342,90.

PAD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2008 adalah Rp 73.970.832.546,54 yang terdiri atas pajak daerah sebesar Rp 20.482.523.532,14, retribusi daerah sebesar Rp 20.334.581.867,04, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 8.965.264.904,64, dan lain-lain PAD yang sah Rp 24.188.462.242,72. PAD pada tahun 2009 terdiri atas pajak daerah sebesar Rp 21.483.458.788,35, retribusi daerah sebesar Rp30.772.662.831,24, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp7.984.540.553,73, dan lain-lain PAD yang sah Rp 26.728.206.014,81. PAD pada tahun 2010 terdiri atas pajak daerah sebesar Rp 22.473.072.506,65, retribusi daerah sebesar Rp33.072.260.549,81, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp10.546.803.258,76, dan lain-lain PAD yang sah Rp21.207.106.883,71. PAD pada tahun 2011 terdiri atas pajak daerah sebesar Rp23.458.553.810,00, retribusi daerah sebesar Rp20.762.677.017,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp13.337.736.000,00, dan lain-lain PAD yang sah Rp33.746.541.490,00. PAD pada tahun 2012 terdiri atas pajak daerah sebesar Rp35.611.451.855,68, retribusi daerah sebesar Rp25.578.138.443,12, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp15.946.498.700,25, dan lain-lain PAD yang sah Rp38.269.913.506,95.

2.3 Gambaran Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi diperoleh terdiri dari tiga sumber yakni Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan kegiatan pengumpulan data sekunder yang telah dilakukan, didapati gambaran dana perimbangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012 yang dapat dilihat Dana perimbangana Tabel 4.3. Berikut data dana perimbangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012

Tabel 4.3 Gambaran Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2000-2012

Tahun	Total Dana Perimbangan		DAU		DBH		DAK	
2000	Rp	619.027.839.540,78	Rp	531.063.983.542,04	Rp	47.603.240.860,69	Rp	40.360.615.138,06
2001	Rp	647.846.874.323,75	Rp	555.787.833.482,34	Rp	49.819.424.635,50	Rp	42.239.616.205,91
2002	Rp	670.840.277.293,12	Rp	575.513.873.889,77	Rp	51.587.617.323,84	Rp	43.738.786.079,51
2003	Rp	697.003.673.070,49	Rp	597.959.451.127,17	Rp	53.599.582.459,12	Rp	45.444.639.484,20
2004	Rp	725.580.984.932,31	Rp	622.475.926.973,43	Rp	55.797.177.741,29	Rp	47.307.880.217,59
2005	Rp	760.010.980.306,61	Rp	652.013.420.005,04	Rp	58.444.844.385,58	Rp	49.552.715.915,99
2006	Rp	798.245.557.724,13	Rp	684.814.863.971,53	Rp	61.385.083.388,99	Rp	52.045.610.363,61
2007	Rp	844.026.806.949,91	Rp	724.090.597.682,33	Rp	64.905.661.454,45	Rp	55.030.547.813,13
2008	Rp	940.565.487.465,00	Rp	816.598.956.217,00	Rp	64.334.679.342,60	Rp	59.631.921.905,40
2009	Rp	1.036.440.536.941,85	Rp	866.567.931.937,00	Rp	79.598.633.237,10	Rp	90.273.707.767,60
2010	Rp	927.297.552.851,00	Rp	778.095.376.597,00	Rp	65.930.856.007,70	Rp	83.364.050.001,30
2011	Rp	954.894.237.247,00	Rp	815.653.050.000,00	Rp	57.309.987.247,00	Rp	81.931.200.000,00
2012	Rp	957.142.909.406,63	Rp	819.266.649.977,58	Rp	55.808.170.708,19	Rp	82.068.088.720,87

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 619.027.839.540,78 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 531.063.983.542,04, DBH sebesar Rp 47.603.240.860,69, dan DAK sebesar Rp 40.360.615.138,06. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 647.846.874.323,75 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 555.787.833.482,34, DBH sebesar Rp 49.819.424.635,50, dan DAK sebesar Rp 42.239.616.205,91. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2002 adalah Rp 670.840.277.293,12 terdiri atas DAU Rp 575.513.873.889,77, DBH sebesar Rp 51.587.617.323,84, dan DAK sebesar Rp 43.738.786.079,51. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2003 adalah Rp 697.003.673.070,49 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 597.959.451.127,17, DBH Rp 53.599.582.459,12, dan DAK sebesar Rp 45.444.639.484,20.

Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 725.580.984.932,31 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 622.475.926.973,43, DBH sebesar Rp 55.797.177.741,29, dan DAK sebesar Rp 47.307.880.217,59. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 760.010.980.306,61 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 652.013.420.005,04, DBH sebesar Rp 58.444.844.385,58, dan DAK sebesar Rp 49.552.715.915,99. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 798.245.557.724,13 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 684.814.863.971,53, DBH sebesar Rp 61.385.083.388,99, dan DAK sebesar Rp 52.045.610.363,61. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 844.026.806.949,91 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 724.090.597.682,33, DBH sebesar Rp 64.905.661.454,45, dan DAK sebesar Rp 55.030.547.813,13.

Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 940.565.487.465,00 yang terdiri atas DAU sebesar Rp 816.598.956.217, DBH sebesar Rp 64.334.679.342,6, dan DAK sebesar Rp 59.631.921.905,4. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2009 sebesar Rp 1.036.440.536.941,85 terdiri atas DAU sebesar Rp 866.567.931.937, DBH sebesar Rp 79.598.633.237,1 dan

DAK sebesar Rp90.273707.767,6. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 927.297.552.851,00 terdiri atas DAU sebesar Rp778.095.376.597, DBH sebesar Rp65.930.856.007,7 dan DAK sebesar Rp83.364050001,3. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 954.894.237.247,00 terdiri atas DAU sebesar Rp815.653.050.000, DBH sebesar Rp57.309.987.247, dan DAK sebesar Rp 81.931.200.000. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi 2012 adalah Rp 957.142.909.406,63 terdiri atas DAU sebesar Rp819.266.649.977,58 DBH sebesar Rp55.808.170.708,19 dan DAK sebesar Rp82.068.088.720,87

4.2.4 Gambaran Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data sekunder yang telah dilakukan, didapati gambaran angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012 yang dapat dilihat Dana perimbangana Tabel 4.4. Berikut data dana perimbangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012

Tabel 4.4 Gambaran Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2000	1.468.381 jiwa	310.627 jiwa	21,15 %
2001	1.475.348 jiwa	297.113 jiwa	20,14 %
2002	1.492.040 jiwa	284.262 jiwa	19,05 %
2003	1.540.000 jiwa	278.495 jiwa	18,08 %
2004	1.557.436 jiwa	264.583 jiwa	16,99 %
2005	1.575.089 jiwa	236.100 jiwa	14,99 %
2006	1.576.382 jiwa	229.750 jiwa	14,57 %
2007	1.580.441 jiwa	227.300 jiwa	14,38 %
2008	1.583.918 jiwa	218.133 jiwa	13,77 %
2009	1.587.872 jiwa	193.107 jiwa	12,16 %
2010	1.591.683 jiwa	175.059 jiwa	10,99 %
2011	1.594.984 jiwa	163.994 jiwa	10,28 %
2012	1.599.357 jiwa	155.797 jiwa	9,74 %

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Keterangan:

Persentase penduduk Miskin = (Jumlah Penduduk Miskin : Jumlah Penduduk) x 100%

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000 adalah sebanyak 1.468.381 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 310.627 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 21,15 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2001 adalah sebanyak 1.475.348 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 297.113 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 20,14 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002 adalah sebanyak 1.492.040 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 284.262 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 19,05 %.. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2003 adalah sebanyak 1.540.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 278.495 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 18,08 %.

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 adalah sebanyak 1.557.436 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 264.583 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 16,99 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2005 adalah sebanyak 1.575.089 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 236.100 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 14,99 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.576.382 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 229.750 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 14,57 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2007 adalah sebanyak 1.580.441 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 227.300 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 14,38%.

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000 adalah sebanyak 1.583.918 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 218.133 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 13,77 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 adalah sebanyak 1.587.872 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 193.107 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 12,16 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.591.683 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 175.059 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 10,99 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 adalah sebanyak 1.594.984 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 163.994 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 10,28 %. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.599.357 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskinnya adalah sebanyak 155.797 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada saat itu adalah 9,74 %.

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12). Adapun hasil uji analisis deskriptif adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
					Deviation
PAD (X_1)	13	2.E10	1.E11	6.05E10	2.870E10
Dana Perimbangan (X_2)	13	6.E11	1.E13	6.89E12	2.191E13
Jumlah Penduduk Miskin (Y)	13	155797	310627	233409,23	51456,905
Valid N (listwise)	13				

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.5, berkaitan dengan analisis deskriptif statistik dapat dilihat bahwa dengan jumlah data adalah sebanyak 13. Variabel jumlah penduduk miskin (Y) mempunyai rata-rata sebesar 233.409,23 jiwa, dengan nilai minimal sebesar 155.797 jiwa, nilai maksimal sebesar 310.627 jiwa dan nilai standar deviasinya adalah 51456,905. Variabel PAD (X_1) mempunyai rata-rata sebesar Rp6.05E10 atau Rp60.529.127.990,14, nilai minimal sebesar Rp2.E10 atau Rp23.624.076.936,95, nilai maksimalnya sebesar Rp1.E11 atau Rp115.406.002.506,00, serta nilai standar deviasinya 2.870E10. Variabel Dana Perimbangan (X_2) mempunyai rata-rata sebesar Rp6.89E12 atau Rp6892710302518.57 dengan nilai minimal sebesar Rp6.E11 atau Rp619.027.839.540,78, nilai maksimal sebesar Rp1.E13 atau Rp1.036.440.536.941,85 dan standar deviasinya sebesar 2.191E13.

4.4 Uji Statistik

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel *dependen* pada satu atau lebih variabel *independen* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel *independen* yaitu PAD, dan Dana Perimbangan, serta variabel *dependen* yaitu jumlah penduduk miskin. Berikut pada Tabel 4.6 disajikan hasil analisis regresi linear berganda ;

Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel <i>Independent</i>	<i>Unstandardized</i> <i>Coefficients B</i>	T	t_{tabel}	Sig.	α	Keterangan
(Constant)	240631,304	-	-	-	-	-
PAD (X_1)	-0,679	-6,913	> -4,302	0,009	< 0,05	Signifikan
Dana Perimbangan (X_2)	-0,563	-5,858	> -4,302	0,016	< 0,05	Signifikan
<i>Adjusted R Square</i> = 0,848				F. Hitung = 31,282 Sig. F = 0,004		

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah ;

$$Y = 240631,304 + (-0,679)X_1 + (-0,563)X_2$$

1. Nilai konstanta 240631,304, menunjukkan bahwa jika tidak ada PAD dan Dana Perimbangan maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 240631,304 jiwa;
2. Nilai koefisien -0,679 pada PAD, menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar -0,679;
3. Nilai koefisien -0,563 pada Dana Perimbangan, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi sebesar -0,563.

4.4.2 Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap variabel *dependen* yaitu jumlah penduduk miskin secara simultan. Tabel distribusi F dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) df_1 atau $3-1 = 2$, dan df_2 $n-k$ atau $13-2 = 11$. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal

ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($31,282 > 19$) dan signifikansi ($0,004 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

4.4.3 Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* secara signifikan secara parsial. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 2 sisi, $0,05 : 2 = 0,025$), dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $13-2-1 = 10$. Hasil analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, dan Dana Perimbangan terhadap variabel *dependen* yaitu jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut;

1. Variabel PAD (X_1) memiliki nilai $t -6,913 > 4,302$ dan signifikansi $0,009 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.;
2. Variabel Dana Perimbangan (X_2) memiliki nilai $t -5,858 > 4,302$ dan signifikansi $0,016 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

4.4.4 Koefisien Determinasi

Berfungsi untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan, maka dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi berganda (R^2). Dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya persentase

sumbangan pengaruh variabel PAD, dan Dana Perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R^2) menunjukkan sebesar 0,848 atau 84,8 % dan sisanya 15,2 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, jumlah pengangguran, jumlah usaha yang akan memberikan penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan perkapita.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*) (Gujarati dalam Latan, 2013:14). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain yaitu : data berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, dan tidak adanya heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (Prayitno, 2010:71). Adapun hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

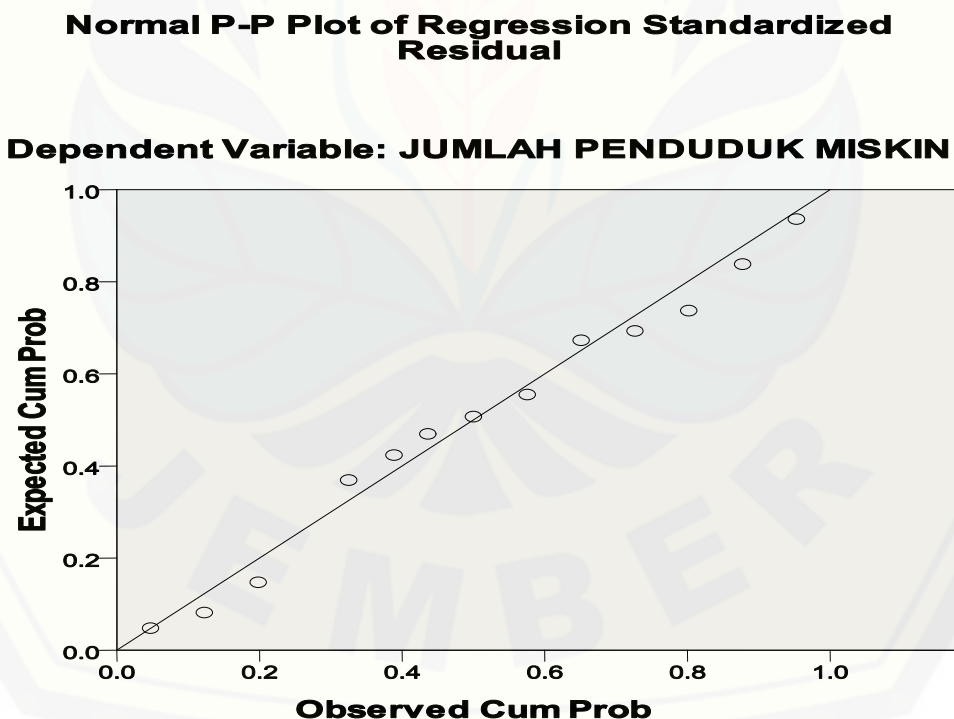
<i>Test of Normality</i>	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>			Keterangan
	Sig.		<i>Cutt off</i>	
X ₁	0,882	>	0,05	Normal
X ₂	0,601	>	0,05	Normal
Y	0,694	>	0,05	Normal

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji normalitas juga bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013:42). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.2, sebagai berikut ;



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.2, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinieritas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas ;

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Test of Multikolinierity</i>	VIF	<i>Cutt off</i>	Keterangan
PAD (X_1)	1,001	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas
Dana Perimbangan (X_2)	1,001	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas

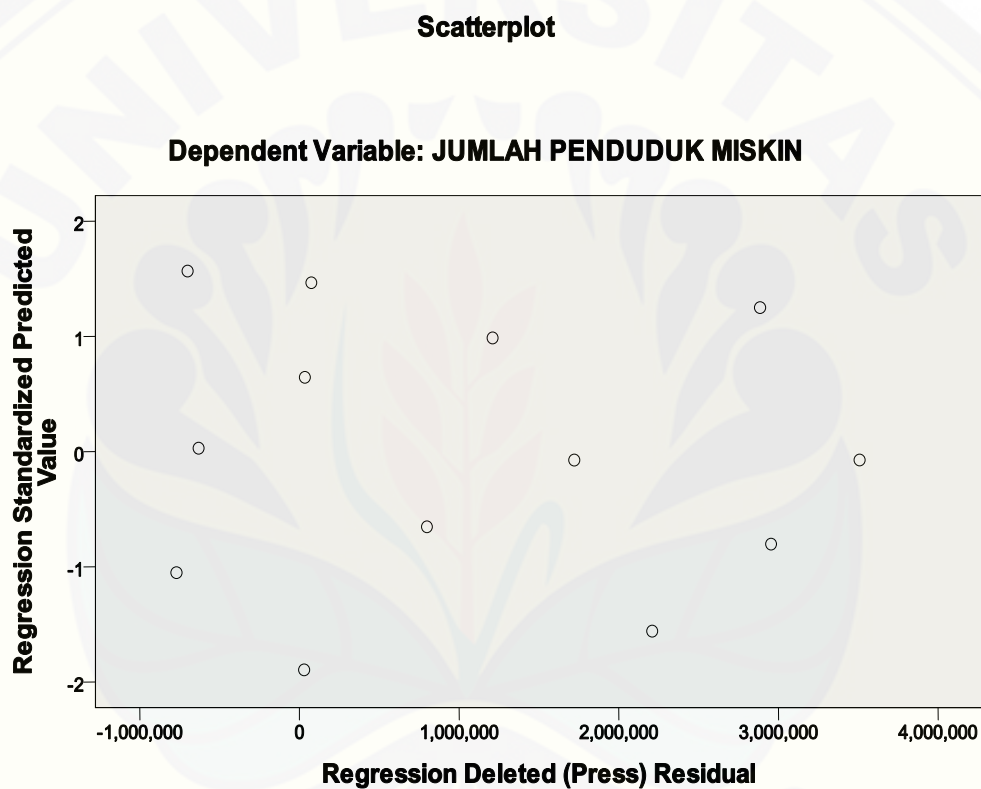
Sumber : Lampiran 2

Tabel 4.8, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel *independen* karena menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:39). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.3, sebagai berikut ;



Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.3, menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

4.5.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson (D-W)* untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model. Apabila nilai Durbin-Watson statistik terletak -2 sampai dengan +2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5% (Sarwono, 2013:52).

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

Nilai D-W	Keterangan
1,344	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.9. diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* dari persamaan diatas pada penelitian ini berada diantara -2 sampai dengan +2, maka dapat diartikan bahwa dari kedua model persamaan regresi yang telah dirumuskan tidak terjadi autokorelasi.

4.6 Pembahasan

Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi dengan arah negatif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “terdapat pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi” adalah diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa jika PAD, dan Dana Perimbangan memiliki nilai negatif, maka akan memberikan pengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Sebaliknya, jika memiliki nilai positif maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

4.6.1 Pengaruh PAD Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi wilayah asli daerah tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD sebesar $-0,679$ atau $-67,9\%$ dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan PAD maka akan mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Apabila terdapat penurunan PAD maka akan mempengaruhi menambah jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menemukan bahwasannya PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012. PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berasal dari pelayanan kesehatan, pelayanan pemakaman, pemakaian kekayaan daerah, grosir, atau pertokoan, tempat pelalangan, rumah pemotongan hewan, mendirikan bangunan, serta izin gangguan keamanan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Lain-lain PAD yang sah daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berasal dari jasa giro atas penyimpanan APBD, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, dan komisi ataupun potongan.

Besarnya nilai PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah akan memberikan peluang yang besar bagi daerah tersebut untuk mensejahterkan masyarakatnya. Artinya diperolehnya PAD yang besar akan membuat suatu daerah mampu untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. PAD yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi ini nantinya akan diolah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perolehan PAD ini dilakukan dengan membangun industri kreatif dan menggali potensi daerah secara lebih dalam lagi untuk menciptakan perusahaan-perusahaan daerah yang lebih produktif. Peningkatan peluang usaha kreatif yang tercipta melalui pengelolaan PAD akan mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri.

Peningkatan peluang usaha kreatif nantinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Semakin banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur. Adanya berbagai usaha kreatif yang dibangun dari PAD ini diharapkan dapat meningkatkan nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat kabupaten Banyuwangi. Semakin tingginya nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi berbagai bentuk kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hidupnya baik kebutuhan pangan, pakaian maupun tempat tinggal yang layak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Setiyawati (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh sebesar terhadap kemiskinan sebesar 9,66%. Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Iskana (2009) menyatakan bahwa pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Astuti yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin per desa di Kabupaten Kebumen tahun 2009-2011. Hal ini berarti, ketika jumlah PADs suatu desa bertambah besar, maka jumlah KK miskin akan berkurang. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bagaimana peran penting PADs dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus menggali potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, supaya jumlah PAD meningkat. Oleh karena itu semakin tingginya nilai PAD di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan secara tidak langsung akan memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan bagi masyarakatnya yang nantinya akan perlahan-lahan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

4.6.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Dana Perimbangan sebesar -0,563 atau -56,3% dengan arah negatif. Hal ini berarti bahwa setiap adanya kenaikan dana perimbangan maka akan mempengaruhi

penurunan jumlah penduduk miskin. Apabila terdapat penurunan dana perimbangan maka akan mempengaruhi menambah jumlah penduduk miskin. Penelitian ini menemukan bahwasannya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2000-2012.

Dana Perimbangan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri dana perimbangan merupakan penerimaan yang berasal dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. DAU merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari APBN yang diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. DAK merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari APBN yang diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan sumber daya alam.

Besarnya nilai dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah akan memberikan kontribusi terhadap pemerataan kemampuan keuangan didalam suatu daerah. Penerimaan dana perimbangan sangat penting dalam menyukseskan program pemerintah dalam melakukan pembangunan didalam suatu wilayahnya. Pembangunan wilayah ini akan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang nantinya mampu menunjang laju pertumbuhan disektor perekonomian yang ada. Laju pertumbuhan disektor perekonomian yang ada tentunya akan memberikan peluang pada masyarakat untuk dapat berkerja atau berwirausaha. Dengan adanya peluang usaha tersebut maka akan memberikan pendapatan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat akan mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk hidupnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) yang menyatakan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Setiyawati (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap kemiskinan sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%. Dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah akan memberikan pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan dan pembangunan yang ada didalam suatu wilayah. Dana perimbangan yang bersifat vital ini mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan berbagai macam ekonomi industri dan produktif, yang nantinya akan memberikan pengaruh dalam memberikan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakatnya. Adanya penyerapan tenaga kerja ini perlahan akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada didalam suatu wilayah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Secara simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan secara bersama akan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan;
2. Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pengelolaan dana PAD maupun dana perimbangan akan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yang meliputi :

1. Penelitian ini dilakukan pada satu wilayah saja yakni Kabupaten Banyuwangi sehingga tidak dapat membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh
2. Sulitnya memperoleh data secara akurat karena rata-rata tiap sumber menyajikan data yang berbeda-beda.
3. Fokus penelitian hanya terpusat pada jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi saja

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut ;

1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dihimbau lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerahnya untuk dapat menciptakan berbagai industri yang produktif, sehingga menunjang penyerapan tenaga kerja diwilayahnya yang akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin;
2. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dihimbau lebih mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan yang telah dilakokasikan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomiannya yang akan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, Ni Luh Nana Putri dan Dwirandra, A.A.N.B.. 2014. “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Hal 481-497
- Astuti, Prihartini Budi. Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Jurnal*. Tidak dipublikasikan.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, dan Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bwariat, Fransisco. 2013. *Kemandirian Keuangan dalam Otonomi Daerah*. Papua: Surat kabar Harian Papua Pos
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development: Putting the Last First*. Prentice Hall
- Friedmann, John. 1992. “*Empowerment: The Politics of Alternative Development*”, Cambridge Mass: Blacwell Book.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginandjar, Kartasmita. 1996. *Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo

- Gunawan, Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 38 Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal : Balitbang Depdagri*
- Hamzah, Ardi dan Setiyawati, Anis. 2007. "Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Desember 2007, vol. 4. No 2, hal 211-228.
- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung: Alfabet
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Iskana, Ida. 2009. "Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran". SKRIPSI, tidak dipublikasikan, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang
- Ismawan, Bambang. 2003. *Keuangan Mikro Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 2003. Jakarta: Gema PKM.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta
- Mudrajad, Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN.
- , 2003 *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta :Gramedia
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. MediaKom, Yogyakarta
- Presiden Republik Indonesia. 1962. *Undang-Undang Nomor 5 Tentang Perusahaan Daerah*. Jakarta: Tidak Diterbitkan
- , 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tentang Peraturan Daerah*. Jakarta: Tidak Diterbitkan
- , 2004. *Undang-Undang 33 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Tidak Diterbitkan
- , 2009. *Nomor 28 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Tidak Diterbitkan
- Rahman, Herlina. 2005. *Paduan Brevet Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riwu, Josef Kaho. 2005. *Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Santoso, Budi. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia". *Jurnal Akuntansi*. Juli 2013. Vol. 5. No 2.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *12 Jurus Ampuh SPSS Untuk Riset Skripsi*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business = Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

- Sidik, Machfud, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, Bintoro 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. (Online). (<http://bps.go.id/> Diakses tanggal 22 Februari 2015)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. (Online). (http://jatim.bps.go.id/website_baru/ Diakses tanggal 22 Februari 2015)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten banyuwangi. 2013. (Online). (<http://banyuwangikab.bps.go.id/webbeta/frontend/>Diakses tanggal 22 Februari 2015)

LAMPIRAN 1. REKAPITULASI DATA SEKUNDER

1. Data Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2000	Rp 677.158.535.911,59	Rp 23.624.076.936,95	Rp 619.027.839.540,78	Rp 34.506.619.433,86
2001	Rp 712.072.768.873,56	Rp 28.112.808.650,01	Rp 647.846.874.323,75	Rp 36.113.085.899,80
2002	Rp 740.185.577.523,57	Rp 31.950.487.475,93	Rp 670.840.277.293,12	Rp 37.394.812.754,52
2003	Rp 772.136.064.999,50	Rp 36.279.146.639,61	Rp 697.003.673.070,49	Rp 38.853.245.289,40
2004	Rp 808.415.211.639,11	Rp 42.387.989.371,05	Rp 725.580.984.932,31	Rp 40.446.237.335,75
2005	Rp 850.803.201.010,16	Rp 48.426.743.760,78	Rp 760.010.980.306,61	Rp 42.365.476.942,77
2006	Rp 899.229.944.770,94	Rp 56.487.590.754,76	Rp 798.245.557.724,13	Rp 44.496.796.292,05
2007	Rp 955.717.535.525,70	Rp 64.641.936.972,16	Rp 844.026.806.949,91	Rp 47.048.791.603,63
2008	Rp 1.020.359.472.497,86	Rp 73.970.832.546,54	Rp 940.565.487.465,00	Rp 5.823.152.486,32
2009	Rp 1.143.692.289.989,91	Rp 86.977.565.944,72	Rp 1.036.440.536.941,85	Rp 20.274.187.103,34
2010	Rp 1.205.516.033.872,32	Rp 87.307.973.996,32	Rp 927.297.552.851,00	Rp 190.910.507.025,00
2011	Rp 1.211.463.764.985,00	Rp 91.305.508.317,00	Rp 954.894.237.247,00	Rp 165.264.019.421,00
2012	Rp 1.241.077.787.152,28	Rp 115.406.002.506,00	Rp 957.142.909.406,63	Rp 168.528.875.239,65

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Tahun	Total PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2000	Rp 23.624.076.936,95	Rp 7.940.052.258,51	Rp 10.144.178.636,73	Rp 2.145.066.185,88	Rp 3.394.779.855,84
2001	Rp 28.112.808.650,01	Rp 9.448.714.987,27	Rp 12.071.640.034,31	Rp 2.552.643.025,42	Rp 4.039.810.603,01
2002	Rp 31.950.487.475,93	Rp 10.738.558.840,66	Rp 13.719.539.322,16	Rp 2.901.104.262,81	Rp 4.591.285.050,29
2003	Rp 36.279.146.639,61	Rp 12.193.421.185,57	Rp 15.578.265.567,05	Rp 3.294.146.514,88	Rp 5.213.313.372,11
2004	Rp 42.387.989.371,05	Rp 14.246.603.227,61	Rp 18.201.402.635,93	Rp 3.848.829.434,89	Rp 6.091.154.072,62
2005	Rp 48.426.743.760,78	Rp 16.276.228.578,00	Rp 20.794.443.770,88	Rp 4.397.148.333,48	Rp 6.958.923.078,42
2006	Rp 56.487.590.754,76	Rp 18.985.479.252,67	Rp 24.255.771.470,09	Rp 5.129.073.240,53	Rp 8.117.266.791,46
2007	Rp 64.641.936.972,16	Rp 21.726.155.016,34	Rp 27.757.247.735,85	Rp 5.869.487.877,07	Rp 9.289.046.342,90
2008	Rp 73.970.832.546,54	Rp 20.482.523.532,14	Rp 20.334.581.867,04	Rp 8.965.264.904,64	Rp 24.188.462.242,72
2009	Rp 86.977.565.944,72	Rp 21.483.458.788,35	Rp 30.772.662.831,24	Rp 7.984.540.553,73	Rp 26.728.206.014,81
2010	Rp 87.307.973.996,32	Rp 22.473.072.506,65	Rp 33.072.260.549,81	Rp 10.546.803.258,76	Rp 21.207.106.883,71
2011	Rp 91.305.508.317,00	Rp 23.458.553.810,00	Rp 20.762.677.017,00	Rp 13.337.736.000,00	Rp 33.746.541.490,00
2012	Rp 115.406.002.506,00	Rp 35.611.451.855,68	Rp 25.578.138.443,12	Rp 15.946.498.700,25	Rp 38.269.913.506,95

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

3. Data Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012

Tahun	Total Dana Perimbangan		DAU		DBH		DAK	
2000	Rp	619.027.839.540,78	Rp	531.063.983.542,04	Rp	47.603.240.860,69	Rp	40.360.615.138,06
2001	Rp	647.846.874.323,75	Rp	555.787.833.482,34	Rp	49.819.424.635,50	Rp	42.239.616.205,91
2002	Rp	670.840.277.293,12	Rp	575.513.873.889,77	Rp	51.587.617.323,84	Rp	43.738.786.079,51
2003	Rp	697.003.673.070,49	Rp	597.959.451.127,17	Rp	53.599.582.459,12	Rp	45.444.639.484,20
2004	Rp	725.580.984.932,31	Rp	622.475.926.973,43	Rp	55.797.177.741,29	Rp	47.307.880.217,59
2005	Rp	760.010.980.306,61	Rp	652.013.420.005,04	Rp	58.444.844.385,58	Rp	49.552.715.915,99
2006	Rp	798.245.557.724,13	Rp	684.814.863.971,53	Rp	61.385.083.388,99	Rp	52.045.610.363,61
2007	Rp	844.026.806.949,91	Rp	724.090.597.682,33	Rp	64.905.661.454,45	Rp	55.030.547.813,13
2008	Rp	940.565.487.465,00	Rp	816.598.956.217,00	Rp	64.334.679.342,60	Rp	59.631.921.905,40
2009	Rp	1.036.440.536.941,85	Rp	866.567.931.937,00	Rp	79.598.633.237,10	Rp	90.273.707.767,60
2010	Rp	927.297.552.851,00	Rp	778.095.376.597,00	Rp	65.930.856.007,70	Rp	83.364.050.001,30
2011	Rp	954.894.237.247,00	Rp	815.653.050.000,00	Rp	57.309.987.247,00	Rp	81.931.200.000,00
2012	Rp	957.142.909.406,63	Rp	819.266.649.977,58	Rp	55.808.170.708,19	Rp	82.068.088.720,87

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

4. Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi tahun 2000-2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2000	1.468.381 jiwa	310.627 jiwa	21,15 %
2001	1.475.348 jiwa	297.113 jiwa	20,14 %
2002	1.492.040 jiwa	284.262 jiwa	19,05 %
2003	1.540.000 jiwa	278.495 jiwa	18,08 %
2004	1.557.436 jiwa	264.583 jiwa	16,99 %
2005	1.575.089 jiwa	236.100 jiwa	14,99 %
2006	1.576.382 jiwa	229.750 jiwa	14,57 %
2007	1.580.441 jiwa	227.300 jiwa	14,38 %
2008	1.583.918 jiwa	218.133 jiwa	13,77 %
2009	1.587.872 jiwa	193.107 jiwa	12,16 %
2010	1.591.683 jiwa	175.059 jiwa	10,99 %
2011	1.594.984 jiwa	163.994 jiwa	10,28 %
2012	1.599.357 jiwa	155.797 jiwa	9,74 %

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Keterangan:

$$\text{Persentase penduduk Miskin} = (\text{Jumlah Penduduk Miskin} : \text{Jumlah Penduduk}) \times 100\%$$

LAMPIRAN 2. HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

DESCRIPTIVES VARIABLES=X.1 X.2 Y
 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	13	2.E10	1.E11	6.05E10	2.870E10
Dana Perimbangan	13	6.E11	1.E13	6.89E12	2.191E13
Jumlah Penduduk Miskin	13	155797	310627	233409.23	51456.905
Valid N (listwise)	13				

REGRESSION
 /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Y
 /METHOD=ENTER X.1 X.2
 /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
 /RESIDUALS DURBIN NORM(ZRESID)

 /SAVE PRED.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Jumlah Penduduk Miskin	233409.23	51456.905	13
PAD	6.05E10	2.870E10	13
Dana Perimbangan	6.89E12	2.191E13	13

Correlations

		Jumlah Penduduk Miskin	PAD	Dana Perimbangan
Pearson Correlation	Jumlah Penduduk Miskin	1.000	-.976	-.027
	PAD	-.976	1.000	-.036
	Dana Perimbangan	-.027	-.036	1.000
Sig. (1-tailed)	Jumlah Penduduk Miskin	.	.000	.465
	PAD	.000	.	.453
	Dana Perimbangan	.465	.453	.
N	Jumlah Penduduk Miskin	13	13	13
	PAD	13	13	13
	Dana Perimbangan	13	13	13

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.978 ^a	.957	.848	1688.602	1.344

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.041E10	2	1.520E10	31.282	.004 ^a
	Residual	1.366E9	10	1.366E8		
	Total	3.177E10	12			

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	240631.304	7931.365		42.947	.540		
	PAD	-1.755E-6	.000	-.679	-6.913	.009	.999	1.001
	Dana Perimbangan	-1.476E-10	.000	-.563	-5.858	.016	.999	1.001

a. Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAD	Dana Perimbangan
1	1	2.068	1.000	.04	.04	.06
	2	.844	1.566	.01	.02	.93
	3	.089	4.823	.95	.95	.01

a. Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin

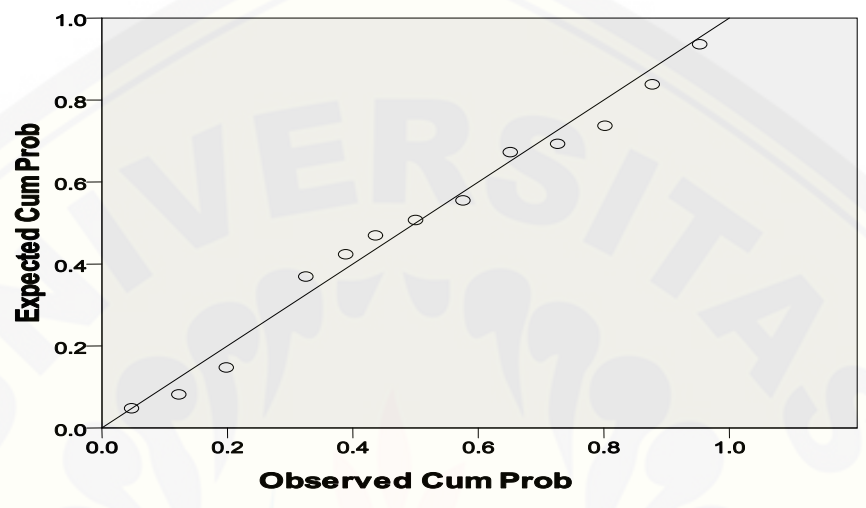
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	137998.30	299089.06	233409.23	50338.457	13
Std. Predicted Value	-1.895	1.305	.000	1.000	13
Standard Error of Predicted Value	3402.853	11688.576	5208.473	2183.340	13
Adjusted Predicted Value	-3278761.50	295758.50	-37229.91	975314.725	13
Residual	-19449.404	17798.703	.000	10670.185	13
Std. Residual	-1.664	1.523	.000	.913	13
Stud. Residual	-1.753	1.942	.076	1.046	13
Deleted Residual	-21586.846	3508511.500	270639.138	972957.404	13
Stud. Deleted Residual	-1.998	2.334	.071	1.160	13
Mahal. Distance	.094	11.077	1.846	2.922	13
Cook's Distance	.000	30032.914	2310.326	8329.601	13
Centered Leverage Value	.008	.923	.154	.244	13

a. Dependent Variable: Jumlah Penduduk Miskin

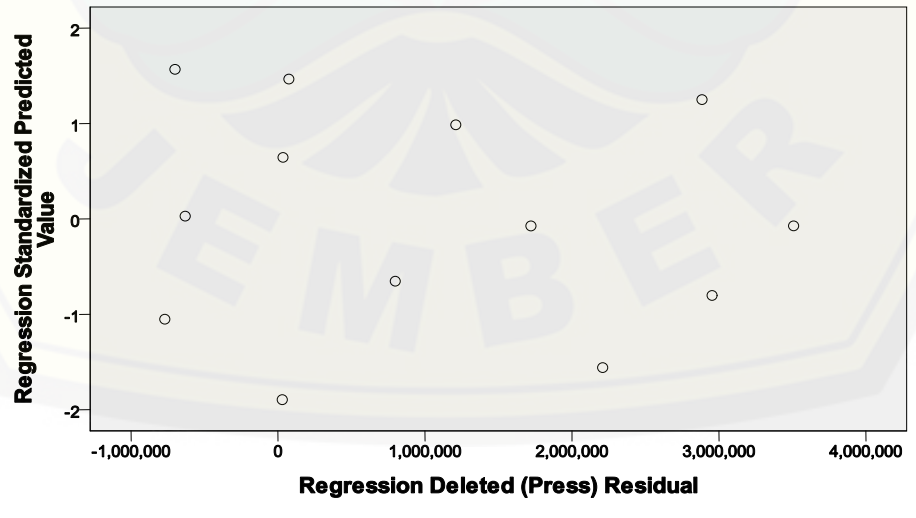
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: JUMLAH PENDUDUK MISKIN



Scatterplot

Dependent Variable: JUMLAH PENDUDUK MISKIN



NPAR TESTS

/K-S(NORMAL)=X.1 X.2 Y

/MISSING ANALYSIS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	Dana Perimbangan	Jumlah Penduduk Miskin
N		13	13	13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	6.05E10	6.89E12	233409.23
	Std. Deviation	2.870E10	2.191E13	51456.905
Most Extreme Differences	Absolute	.129	.528	.117
	Positive	.125	.528	.102
	Negative	-.129	-.387	-.117
Kolmogorov-Smirnov Z		.466	1.905	.423
Asymp. Sig. (2-tailed)		.882	.601	.694

a. Test distribution is Normal.

LAMPIRAN 3. TABEL t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

LAMPIRAN 4. TABEL F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89